



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat : Jl. A. Yani No. 2 Telp. (0511) 721504 Fax. (0511) 721453 Martapura 70611 Kabref  
Website : [www.bappeda.banjarkab.go.id](http://www.bappeda.banjarkab.go.id) Email : [info@bappeda.banjarkab.go.id](mailto:info@bappeda.banjarkab.go.id)

Martapura, 14 Februari 2022

Nomor : PN.01/126/PPI/Bappedalitbang/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Penawaran Kerjasama Swakelola

Kepada Yth.  
Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari  
di -

Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan dengan Metode Swakelola Tipe II, dengan ini menawarkan kepada Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan (**Penyusunan Kajian Analisis Pengaruh Indikator Pendidikan Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Banjar**). Bersama surat ini kami sampaikan juga rancangan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai bahan kajian awal.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan ini, diminta Saudara untuk segera memasukkan Usulan Proposal, Teknis dan Biaya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Badan,  
  
H. MOHAMMAD RIZA DAULY, ST., MT  
Pembina TKI (V/D)  
NIP. 19771018 200312 1008



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020**

KAMPUS : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYUTANGI BANJARMASIN-70123, TELP/FACS (0511) 3304352 www.uniska-bjm.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 24/UNISKA-LP2M/I/2022

**TENTANG  
TIM KAJIAN**

**ANALISIS PENGARUH INDIKATOR PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN BANJAR**

Bismillahirrahmanirrahim,

**KETUA LPPM**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI BANJARMASIN**

- Menimbang** : a. Bahwa dosen wajib meningkatkan Kinerja Penelitian Di Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)  
b. Guna Meningkatkan mutu dan keunggulan Perguruan tinggi dimasa yang akan datang  
c. Sehubungan dengan butir a dan butir b di atas dipandang perlu menerbitkan surat keputusan
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  
b. PP No 4 Tahun 2014 tentang peyelengara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
d. Surat Dirjen Dikti Nomor 2050/E/T/2011 tentang kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal;  
e. Keputusan Badan Pembina Yayasan Uniska Muhammad Arsyad Al- Banjari (UNISKA) Banjarmasin No : 01/SK-Pembina/VIII/2017 Tentang Pengesahan Statuta UNISKA MAB Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kajian Analisis Pengaruh Indikator Pendidikan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjar
- Kedua** : Tim bertugas mengkaji analisis pengaruh indikator pendidikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjar. Sejak dikelurakannya Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dari surat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banjar



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020**

KAMPUS : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYUTANGI BANJARMASIN-70123, TELP/FACS (0511) 3304352 www.uniska-bjm.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Islam Kalimantan

Nomor : 24/UNISKA-LP2M/I/2022

Tanggal : 19 Januari 2022

**PERSONALIA TIM KAJIAN  
ANALISIS PENGARUH INDIKATOR PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN BANJAR**

Ketua Pelaksana : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.

Rizka Zulfikar, S.TP., M.M.

Dr. Didi Susanto, S.Sos., M.I.Kom., M.Pd.

Ketua;  
  
Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.  
NIP. 19670107 199403 1 002





**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020**

KAMPUS : JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYUTANGI BANJARMASIN-70123, TELP/FACS (0511) 3304352 [www.uniska-bjm.ac.id](http://www.uniska-bjm.ac.id)

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak diterbitkan surat keputusan ini, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banjarmasin  
Pada tanggal : 19 Januari 2022

Ketua,  
  
Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.  
NIP. 19670107 199403 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan UNISKA
2. Yth. Rektor UNISKA
3. Yth. Wakil Rektor 1 UNISKA
4. Arsip.



Berita **Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi**

## TARGETKAN KENAIKAN RATA-RATA LAJU IPM, KABUPATEN BANJAR BEKERJASAMA DENGAN UNISKA

03/31/2022 admin

**MARTAPURA** – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui bidang Litbang dan Inovasi menggelar kegiatan seminar proposal penelitian hasil kerjasama dengan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari yaitu “Analisis Pengaruh Indikator Pendidikan Sebagai Daya Ungkit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjar” dipimpin langsung oleh Kabid Litbang dan Inovasi Santi Nurlaela Selasa (29/3/2022), bertempat di aula Bauntung martapura.

Santi, sapan akrab Kabid Litbang dan Inovasi mengatakan bahwa pelaksanaan kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan IPM Kabupaten Banjar dan mengidentifikasi strategi-strategi dalam bentuk policy brief yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPM melalui dimensi pendidikan.

Dijelaskan pula oleh Santi, Kabupaten Banjar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki IPM yang selalu mengalami pertumbuhan dan masuk dalam kategori sedang.

“Tapi jika dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan nilai IPM (*reduksi shortfall*) selama kurun waktu tersebut termasuk dalam kategori rendah yaitu 0,74% (periode tahun 2010-2021) dan hanya menempati peringkat -11 dari 13 Kabupaten diseluruh Kalimantan Selatan,” ujarnya.

“hal tersebut menunjukkan bahwa program-program pembangunan di Kabupaten Banjar walaupun memberikan pengaruh positif pada perbaikan kualitas hidup penduduknya tapi belum cukup besar jika dibandingkan dengan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota lainnya,” jelasnya.

“Oleh karena itu diperlukan penelitian atau kajian rendahnya laju pertumbuhan IPM agar dapat diperbaiki kondisinya, tambah Santi.

Sementara itu Nurul Listiyani dkk, selaku tim peneliti memaparkan kajian akan dilakukan yaitu kajian deskriptif kuantitatif-kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan teknik *partial least of square* (PLS) untuk menentukan pengaruh indikator-indikator dimensi pembentuk IPM, yang selanjutnya dikaji penyebab dan strategi perbaikan sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan.

Acara ini dihadiri beberapa instansi terkait diantaranya Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Ekonomi Setda Banjar, dan Bappedalitbang Kabupaten Banjar. (**Bappedalitbang**)

[← FORUM GABUNGAN BAHAS PROYEK STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS](#)

[MUSRENBANG RKPD TAHUN 2023 KABUPATEN BANJAR →](#)

Banner





# SIELOK



# SITAPAJA

## Klinik Inovasi



## Jamin Inovasi



## Layanan



## Tautan

[KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA](#)



[KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH](#)



[BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN](#)



[KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS](#)



[KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA](#)



[LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT](#)



### Kontak Kami

Bappeda Litbang  
Kabupaten Banjar  
Jl. Ahmad Yani No. 2  
Martapura Telp. 0511.  
4721504 Fax. 0511.  
4721453  
[bappedalitbang@banjar.kab.go.id](mailto:bappedalitbang@banjar.kab.go.id)

# LAPORAN AKHIR



## **ANALISIS PENGARUH INDIKATOR PENDIDIKAN SEBAGAI DAYA UNGKIT PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BANJAR**

### **TIM PENELITIAN :**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Dr. Nurul Listiyani,SH, MH (Ketua)               | NIDN : 1102127301 |
| 2. Dr. Achmad Jaelani, S.Pt, M.Si (Anggota)         | NIDN : 0007016701 |
| 3. Dr. Didi Susanto, S.Sos, M.I.Kom, M.Pd (Anggota) | NIDN : 1101058401 |
| 4. Rizka Zulfikar, STp, MM (Anggota)                | NIDN : 1106127301 |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
BANJARMASIN  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR**

- 1. Judul Penelitian** : Analisis Pengaruh Indikator Pendidikan Sebagai Daya Ungkit Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar
- 2. Bidang Ilmu** : Sosial Ekonomi
- 3. Ketua Tim Peneliti**
- a. Nama Lengkap : Dr. Nurul Listiyani, SH, MH  
b. NIDN : 1102127301  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Telpn : 082350534466  
f. Email : nurullistiyani5@gmail.com
- Anggota Peneliti (1)**
- a. Nama Lengkap : Dr. Achmad Jaelani, SPt, MSi  
b. NIDN : 0007016701  
c. Program Studi : Pertanian
- Anggota Peneliti (2)**
- d. Nama Lengkap : Dr. Didi Susanto, S.Sos, M.I.Kom, M.Pd  
e. NIDN : 1101058401  
f. Program Studi : Ilmu Komunikasi
- Anggota Peneliti (3)**
- a. Nama Lengkap : Rizka Zulfikar, STp, MM  
b. NIDN : 1106127301  
c. Program Studi : Manajemen
- 3. Biaya Penelitian** : Rp 85.998.000,-
- 4. Skim Penelitian** : Kompetitif
- 5. Sumber Dana** : APBD Kabupaten Banjar Tahun 2022

Banjarmasin, Juni 2022  
Ketua Tim Pengusul



**Dr. Nurul Listiyani, SH, MH**  
NIK. 061204607

**Menyetujui,**  
**Kepala LP2M-UNISKA,**



**Dr. Achmad Djaelani, S.Pt, MSi**  
NIP. 196701071994031002



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami diberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian sebagai wujud kepedulian kami untuk terlibat aktif dalam upaya memberikan masukan dalam perumusan strategi untuk peningkatan IPM di Kabupaten Banjar dalam bentuk penelitian.

Kami selaku tim pengusul dan bagian dari civitas akademika UNISKA terus berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tugas penelitian yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Kepada Masyarakat (LP2M) UNISKA, dan salah satunya adalah melaksanakan amanah dari Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Indikator Pendidikan Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Banjar.

Kepada seluruh Tim Pengusul yang telah berdedikasi dan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam pelaksanaan penelitian ini, dan pihak Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan penelitian yang kami laksanakan serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, kami ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya.

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kab. Kab. Banjar dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan IPM Kabupaten Banjar.

Banjarmasin, Juni 2022  
Hormat Kami,

Tim Pengusul

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	Iii
RINGKASAN	Iv
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	Vi
DAFTAR LAMPIRAN	Vii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Kajian	7
1.4. Manfaat Kajian	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>9</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	<b>18</b>
3.1 Waktu dan Tempat	18
3.2 Tahapan	18
3.3 Metode Kajian	18
3.4. Model Penelitian	19
3.5 Jenis Data	19
3.6. Teknik Analisis Data	20
A. Analisis Kuantitatif	20
B. Analisis Kualitatif	21
<b>BAB 4. HASIL KAJIAN</b>	<b>24</b>
4.1 Deskriptif Kuantitatif	24
4.2. Hasil Analisis SEM-PLS (Structural Equation Model - Partial Least Square)	27
a. Uji t	28
b. Uji F	29
c. Uji Hipotesis	29
d. Uji Kontribusi	30
4.3. Implikasi Hasil Analisa Kuantitatif	31
4.4. Deskriptif Kualitatif	31
4.4.1 Peran pemangku Kebijakan dalam Peningkatan IPM Pendidikan	32

4.4.2	Temuan Hasil penelitian	44
4.5.	SWOT Analysis	45
4.5.1.	Kekuatan	45
4.5.2.	Kelemahan	45
4.5.3.	Peluang	46
4.5.4.	Ancaman	47
4.6.	Analisis Strategi	47
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>49</b>
5.1.	Kesimpulan	49
5.2.	Rekomendasi	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Data IPM Per Kabupaten Di Propinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2010-2021	4
Tabel 2.	Perbandingan IPM Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	4
Tabel 3.	Perbandingan Laju Pertumbuhan IPM Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	5
Tabel 4.	Perbandingan Rata-rata Pertumbuhan IPM Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	5
Tabel 5.	Data Indikator IPM Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010-2021	6
Tabel 6.	Rekapitulasi AHH RHS, HLS dan Pengeluaran perkapita periode tahun 2010- 2020	24
Tabel 7.	Pertumbuhan Indikator IPM Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010-2021	24
Tabel 8.	Pertumbuhan Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010-2021	25
Tabel 9.	Pertumbuhan Angka Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010-2021	25
Tabel 10.	Pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010-2021	26
Tabel 11.	Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Yang Disesuaikan Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010-2021	27
Tabel 12.	Hasil Uji t	28
Tabel 13.	Hasil Uji F	28
Tabel 14.	Hasil Uji Hipotesis	30
Tabel 15.	Hasil Uji Kontribusi	30

## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Capaian IPM Kab. Banjar Tahun 2021	3
Gambar 2.	Rata-rata Laju Pertumbuhan IPM Seluruh Kota/Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan	3
Gambar 3.	Flow Chart Pelaksanaan Penelitian	18
Gambar 4.	Model Penelitian Kualitatif	22
Gambar 5.	Matriks SWOT	23
Gambar 6.	Model Penelitian SEM-PLS	28
Gambar 7.	Wawancara bersama Liana Penny (Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar)	33
Gambar 8.	Wawancara bersama Bapak Najwan Noor (Kepala Departemen Agama Kabupaten Banjar)	34
Gambar 9.	Wawancara bersama Bapak Saufi (Kepala Seksi Pesantren Depag. Kabupaten Banjar)	35



Gambar 10.	Wawancara bersama Mursyidi dan Guru Rasyid (Pengelola Pondok Al Mursidul Amin)	37
Gambar 11.	Wawancara bersama M. Zauhari dan M. Fauzi (Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi dan Infomasi dan Operator EMIS Kesetaraan Pondok Darusalam)	41
Gambar 12.	Wawancara bersama Bapak Sa'Duddin (Guru Pondok Hidatutthalibin Rantau Balai)	43
Gambar 13.	Hasil Analisis Strategi	47

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas L-1
Lampiran 2.	Biodata Tim Pelaksana L-2
Lampiran 3.	Surat Tugas Penelitian L-33
Lampiran 4.	Perjanjian Kerjasama Kajian L-34
Lampiran 5.	Smart PLS Report L-41
Lampiran 6	Pedoman Wawancara L-42

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembaharuan sektor publik dalam pembangunan daerah sangat penting ditingkatkan mengingat hal tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Namun, pembangunan nasional tidak terlepas dari asas otonomi daerah yang memberikan harapan guna peningkatan kinerja institusi daerah dalam usaha untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia menjadikan hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan desentralisasi. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah diberi wewenang tugas-tugas yang perlu direalisasikan.

Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang dilukiskan pada Indeks Pembangunan Manusia yang tergantung pada pemerintah yang sebagai sarana penunjang. Diukurnya Pembangunan Manusia dapat dilihat dengan angka indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia ialah indeks pengukuran pencapaian pembangunan suatu daerah pada kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan pendidikan (Todaro & Smith, 2011).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen dasar dalam membangun kemajuan suatu bangsa, yang berarti bahwa kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas yang dimiliki oleh SDM bangsa tersebut. Sehingga pembangunan kualitas SDM sangat penting dalam membangun kemajuan bangsa, diatas pentingnya pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur dalam membangun kesejahteraan bangsa.

IPM menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut :

- (1) Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- (2) Penentuan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

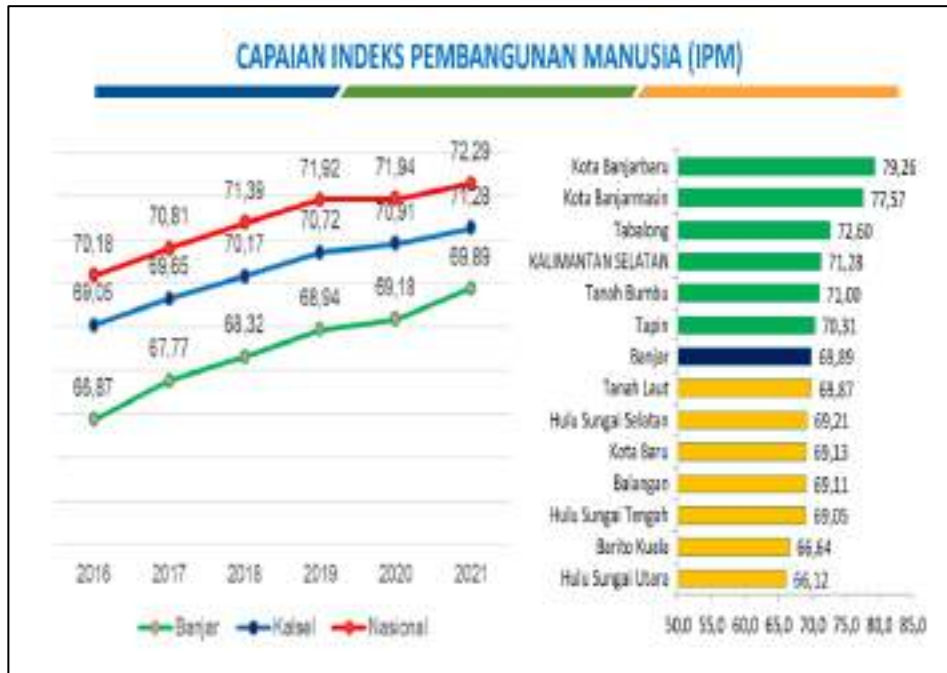
(3) Bagi daerah, Indeks Pembangunan Manusia merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah yang akan datang. Hal ini merupakan langkah penting karena IPM menduduki salah satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Kedudukan dan peranan IPM dalam manajemen pembangunan akan lebih terlihat apabila dilengkapi dengan data yang berisikan indikator relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem basis data pembangunan manusia. Sistem basis data tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut untuk mengenali lebih dalam permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan hasil serta dampak pembangunan manusia.

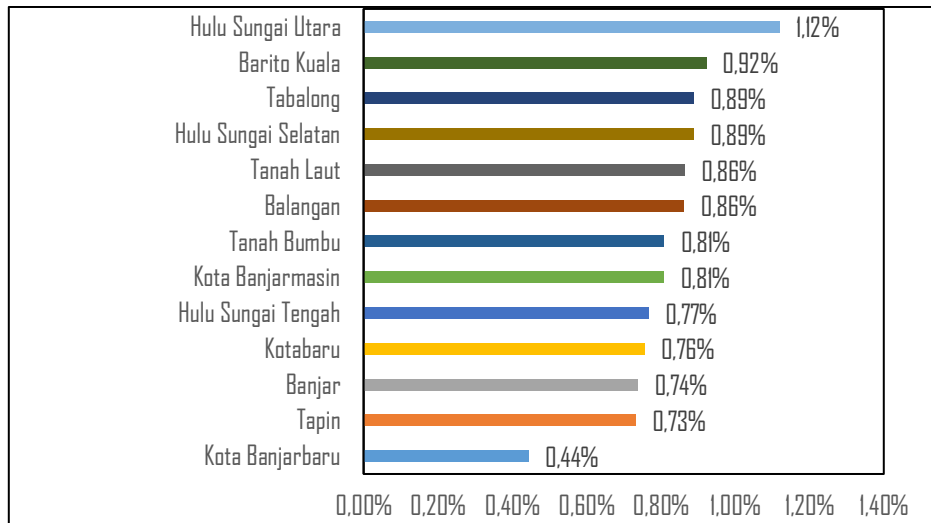
Identifikasi tersebut dirumuskan ke dalam suatu analisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah periode yang akan datang. Proses ini merupakan kajian untuk menghasilkan rekomendasi implikasi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka IPM merupakan alat advokasi kepada para pengambil keputusan dan perumus kebijakan tentang langkah-langkah pada masa mendatang yang perlu dilakukan.

Kabupaten Banjar sebagai salah satu daerah tingkat II di Propinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai IPM yang selalu mengalami pertumbuhan dan masuk dalam kategori sedang. Namun jika dilihat rata-rata laju pertumbuhan nilai IPM (reduksi shortfall) selama kurun waktu tersebut termasuk dalam kategori rendah yakni sekitar 0,74 persen (periode tahun 2010-2021) dan menempati peringkat ke-11 dari 13 Kabupaten. Jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 0,81 persen, rata-rata laju pertumbuhan IPM

Kabupaten Banjar masih terletak dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (periode tahun 2010-2021).



**Gambar 1. Capaian IPM Kab. Banjar Tahun 2021**



**Gambar 2. Rata-rata Laju Pertumbuhan IPM Seluruh Kota/Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan Periode 2010-2021**



Data IPM per-kabupaten Propinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2010 – 2021 di sajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. Data IPM Per Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2010-2021**

No	Nama Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Banjar Baru	71,46	71,15	72,36	72,16	72,71	73,59	77,11	76,31	76,13	76,13	76,15	76,57
2	Kota Banjarmasin	71,12	71,37	71,87	72,11	72,71	73,1	77,29	77,70	78,1	78,15	78,31	78,7
3	Tabalong	71,11	71,27	72,01	72,25	72,7	73,10	77,18	77,38	78,2	78,12	78,3	78,6
4	Tanah Bumbu	70,72	70,57	71,1	71,7	72,1	72,7	77,11	77,3	78,1	78,1	78,7	79,12
5	Tapin	70,52	70,1	70,7	71,15	71,59	72,1	76,57	76,71	77,55	77,7	78,1	78,7
6	Banjar	69,56	70,12	71,12	71,44	72,28	72,7	77,47	77,50	78,1	78,56	78,57	79,7
7	Tanah Laut	69,49	70,36	71,32	71,67	72,37	72,6	77,17	77,35	78,1	78,59	78,62	79,17
8	Hulu Sungai Selatan	68,52	68,1	69,1	69,55	70,1	70,10	74,15	74,1	75,10	75,10	75,10	75,10
9	Kotabaru	67,57	67,06	67,25	67,15	67,25	68,25	72,17	72,17	73,1	73,1	73,1	73,25
10	Balangan	67,06	67,01	67,1	67,1	67,1	67,1	71,1	71,1	72,1	72,1	72,1	72,1
11	Hulu Sungai Tengah	67,11	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	71,1	71,1	72,1	72,1	72,1	72,1
12	Barito Kuala	66,11	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	70,1	70,1	71,1	71,1	71,1	71,1
13	Hulu Sungai Utara	66,11	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	70,1	70,1	71,1	71,1	71,1	71,1

Secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan selama sepuluh tahun terakhir. Tahun 2018, angka IPM Kabupaten Banjar sebesar 68,32 dan mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan sebesar 0,62 point menjadi 68,94 pada tahun 2019. Kemudian meningkat 0.24 point menjadi 69.18% pada tahun 2020 dan meningkat lagi sebesar 0.71 point menjadi 69.89% pada tahun 2021.

Untuk Nilai IPM tahun 2021, kabupaten Banjar menduduki peringkat ke-6 dari 13 kabupaten yang ada di propinsi Kalimantan Selatan (Tabel 2.)

**Tabel 2. Perbandingan IPM Per Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021**

No	Nama Kabupaten	IPM (Thn 2021)
1	Kota Banjar Baru	79,26
2	Kota Banjarmasin	77,57
3	Tabalong	72,60
4	Tanah Bumbu	71,00
5	Tapin	70,31
6	Banjar	69,89
7	Tanah Laut	69,87
8	Hulu Sungai Selatan	69,21
9	Kotabaru	69,13
10	Balangan	69,11
11	Hulu Sungai Tengah	69,05
12	Barito Kuala	66,64
13	Hulu Sungai Utara	66,12

Jika dibandingkan antara nilai IPM tahun 2020 dan tahun 2021, pertumbuhan nilai IPM kabupaten Banjar berhasil tumbuh sebesar 1,03%, dan lebih tinggi dari kabupaten lainnya (Tabel 3).

**Tabel 3. Perbandingan Laju Pertumbuhan IPM Per Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021**

No	Nama Kabupaten	% Pertumbuhan IPM (Thn 2021)
<b>1</b>	<b>Banjar</b>	<b>1,03%</b>
2	Hulu Sungai Utara	0,81%
3	Tanah Laut	0,71%
4	Barito Kuala	0,63%
5	Kota Banjarmasin	0,61%
6	Tabalong	0,57%
7	Hulu Sungai Selatan	0,52%
8	Balangan	0,42%
9	Tanah Bumbu	0,41%
10	Kotabaru	0,39%
11	Hulu Sungai Tengah	0,31%
12	Tapin	0,29%
13	Kota Banjar Baru	0,20%

Namun jika berdasarkan rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2021, Nilai IPM Kabupaten Banjar hanya mampu menduduki peringkat ke-11 dari 13 Kabupaten (Tabel 4).

**Tabel 4. Perbandingan Pertumbuhan IPM Per Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2010- 2021**

No	Nama Kabupaten	Rata-rata % Pertumbuhan IPM (Thn 2010-2021)
1	Hulu Sungai Utara	1,12%
2	Barito Kuala	0,92%
3	Tabalong	0,89%
4	Hulu Sungai Selatan	0,89%
5	Tanah Laut	0,86%
6	Balangan	0,86%
7	Tanah Bumbu	0,81%
8	Kota Banjarmasin	0,81%
9	Hulu Sungai Tengah	0,77%
10	Kotabaru	0,76%
<b>11</b>	<b>Banjar</b>	<b>0,74%</b>
12	Tapin	0,73%
13	Kota Banjar Baru	0,44%

Jika dilihat berdasarkan tiga dimensi dasar pembentuk IPM yakni dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Dimensi kesehatan diwakili

oleh Indeks angka harapan hidup (AHH), dimensi pendidikan diwakili oleh rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS), dan dimensi Standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita Yang disesuaikan (PP). Adapun gambaran perkembangan indikator-indikator pembentuk IPM Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

- Data indikator pembentuk IPM Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010 – 2021 disajikan pada berikut ini.

**Tabel 5. Data Indikator IPM Kabupaten Banjar Periode Tahun 2020- 2021**

No	Tahun	AHH	RLS	HLS	PP (Rp 000)
1	2010	64,94	6,86	10,34	11.753
2	2011	65,05	6,89	10,46	11.844
3	2012	65,17	6,93	10,57	11.921
4	2013	65,27	6,96	10,72	11.984
5	2014	65,32	6,96	10,99	12.004
6	2015	65,97	6,99	11,16	12.185
7	2016	66,17	7,00	11,41	12.311
8	2017	66,38	7,28	11,76	12.366
9	2018	66,66	7,29	11,99	12.571
10	2019	66,97	7,34	12,28	12.681
11	2020	67,21	7,35	12,44	12.603
12	2021	67,41	7,52	12,73	12.707

- Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018, AHH Kabupaten Banjar adalah sebesar 66,69 dan meningkat menjadi 66,97 pada tahun 2019. Kemudian meningkat lagi menjadi 67.21 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 69.41 pada tahun 2021.
- Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar pada tahun 2018 sebesar 7,28, dan sedikit meningkat menjadi 7,29 pada tahun 2019. Kemudian meningkat lagi menjadi 7,34 pada tahun 2020 dan menjadi 7,52 pada tahun 2021.
- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjar pada tahun 2018 sebesar 11,99 dan meningkat menjadi 12,28 pada tahun 2019. Kemudian meningkat lagi menjadi 12,44 pada tahun 2020 dan menjadi 12,73 pada tahun 2021.

- Angka Pendapatan Perkapita yang Disesuaikan Kabupaten Banjar pada tahun 2018 sebesar Rp 12,571 Juta dan meningkat menjadi Rp 12,681 Juta pada tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 12,603 Juta pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi Rp 12,707 Juta pada tahun 2021.

Hal di atas menunjukkan bahwa program-program pembangunan di Kabupaten Banjar walaupun memberikan pengaruh positif pada perbaikan kualitas hidup penduduknya tetapi belum cukup besar jika dibandingkan program-program pembangunan yang telah dilakukan Kabupaten/kota lainnya.

Untuk dapat memperbaiki kondisi tersebut maka kajian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab rendahnya laju pertumbuhan IPM Kabupaten Banjar pada tiga dimensi dasar pembentuk IPM yakni Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan dan Dimensi Standar Hidup Layak. Dimana dimensi kesehatan diwakili oleh Angka harapan hidup (AHH), dimensi pendidikan diwakili oleh Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan dimensi Standar Hidup Layak diwakili oleh Angka Pengeluaran Perkapita disesuaikan (APP).

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah kajian adalah sebagai berikut :

- a) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Banjar ?
- b) Bagaimanakah strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IPM kabupaten Banjar melalui dimensi pendidikan ?

## **1.3. TUJUAN KAJIAN**

Adapun tujuan kajian yang akan dilakukan adalah :

- a) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan IPM Kabupaten Banjar
- b) Mengidentifikasi strategi-strategi dalam bentuk policy brief yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPM melalui dimensi pendidikan



#### **1.4. MANFAAT KAJIAN**

Hasil kajian diharapkan dapat :

- a) Menjadi bahan masukan bagi para pejabat pengambil keputusan dalam rangka menghasilkan strategi/ kebijakan untuk meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Banjar, terutama kebijakan di bidang belanja daerah bidang pendidikan di Provinsi Kabupaten Banjar.
- b) Menjadi informasi dan referensi bagi upaya peningkatan indeks pendidikan di daerah lain.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Pembangunan ekonomi dalam perspektif yang luas dipandang sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup pelbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006). Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk berkembang.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (UNDP, 2000). Pada prinsipnya tujuan dasar dari adanya pembangunan ini yaitu dengan memperbanyak pilihan kepada penduduk dimana pilihan-pilihan ini tidak terbatas dan dapat berubah kapan saja, sehingga penduduk bisa memperoleh akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan pendidikan, nutrisi dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, mata pencaharian yang aman, dan sebagainya. Elemen-elemen pembangunan manusia secara tegas menggaris bawahi sasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup secara layak. Ini berarti pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat. Karena itu, manusia merupakan sentral dari proses pembangunan tersebut (Nagib, 2008).

Salah satu tolok ukur meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS,-). IPM yang tinggi

menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula dan dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintahnya dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nation Development Programe (UNDP)* pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*along and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decentstandard of living*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Oleh karena itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap- tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan (Ananta, 2013).

Menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan diharapkan dapat menciptakan peluang-peluang yang secara langsung menyumbang upaya memperluas dan meningkatkan kemampuan manusia dan kualitas kehidupan mereka, antara lain melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar dan jaminan sosial (Northover, 2014). Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan.

Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang

berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor- sektor publik yang penting, diantaranya investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan yang diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Usmaliadanti, 2011).

Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia. Salah satu bukti keseriusan pemerintah tersebut adalah lewat pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan bukti konkrit peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Sektor pengeluaran pemerintah yang cukup penting dan berpengaruh terhadap pembangunan manusia adalah pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan (Usmaliadanti, 2011).

Keberhasilan proses pendidikan tergantung dari sejauh mana perencanaan yang dilakukan untuk memilih dan memilih program-program yang tepat dalam proses pelaksanaan pendidikan. Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun (2009:3) mengemukakan bahwa perencanaan adalah serangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan , suasana dan sebagainya) dan apa yang akan dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi dan sebagainya).

Sementara itu menurut Fakry (Sa'Ud dan Ma'mun, 2009:4) menjelaskan bahwa:

perencanaan dapat diartikan sebagai poses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan itu dapat pula diberi arti sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Perencanaan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memadukan antara cita-cita

nasional dan *resources* yang tersedia yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Steller (Sarhini dan Lina, 2011:15) menguraikan bahwa, perencanaan ialah hubungan antara apa adanya sekarang (*what is*) dan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan penentu tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber.

Afandi (Sarhini dan Lina, 2011:14), perencanaan mengandung enam pokok pikiran yaitu:

- a. perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan
- b. keadaan masa depan yang diinginkan itu kemudian dibandingkan dengan keadaan sekarang, sehingga dapat dilihat kesenjangannya.
- c. untuk menentukan kesenjangan itu perlu dilakukan usaha-usaha;
- d. usaha-usaha yang dilakukan untuk menutupi kesenjangan dapat beragam dan merupakan alternatif yang mungkin ditempuh;
- e. pemilihan alternatif yang paling baik, dalam arti yang mempunyai efektivitas dan efisiensi yang paling tinggi perlu dilakukan;
- f. alternatif yang dipilih harus diperinci sehingga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan apabila akan dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka perencanaan merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam sebuah siklus proses berbagai macam kegiatan, Sehingga kesempurnaan dan kesuksesan suatu tata laksana kegiatan akan bermuara pada perencanaan yang sempurna. Perencanaan menjadi unsur utama yang harus diperhatikan, jika kita mengacu pada ilmu manajemen pendidikan, baik itu manajemen pendidikan, manajemen kelas, manajemen pembelajaran serta manajemen mutu, maka proses tahapan perencanaan akan menentukan keberhasilan sebuah program yang dijalankan.

Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam sebuah perencanaan pendidikan sebagai berikut

a. Pendekatan Kebutuhan Sosial

Pendekatan ini menekankan pemerataan kesempatan atau kuantitatif dibanding kualitatif. Karena pendidikan dasar merupakan prioritas utama yang harus diberikan kepada setiap anak usia SD. Kewajiban belajar merupakan manifestasi dari tuntutan sosial untuk membebaskan populasi usia sekolah dari tuna aksara atau *free from illiteracy*. Yang dimaksud dengan pendekatan sial menurut Guruge (1972) adalah pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan-tekanan untuk masuk sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan keinginan-keinginan murid dan orang tua secara bebas (Sa'ud dan Makmun, 2004).

b. Pendekatan Kebutuhan Tenaga Kerja

Pendekatan ini mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan seperti sektor ekonom, pertanian, perdagangan, dan industri. Tujuan yang akan dicapai adalah pendidikan itu diperlukan untuk membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik hingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki melalui penghasilan sangat *appealing* karena dikaitkan langsung dengan usaha pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang (Sa'ud dan Makmun, 2004).

c. Pendekatan efisiensi biaya

Pendidikan secara konseptual tampaknya tidak diragukan lagi mempunyai nilai ekonomi, artinya pendidikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun para ahli ekonomi mengalami kesulitan dalam mengukur besarnya kontribusi tersebut. Keterkaitan pendidikan dengan ekonomi dapat terangkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti tenaga kerja, pengetahuan dan teknologi (Sa'ud dan Makmun, 2004).

### **Hasil Kajian Sebelumnya**

- Makhroji dan Nurkhasanah (2019) yang meneliti Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran, menemukan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran, variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran dan secara bersama-sama variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
- Ningrum dkk (2020) yang mengkaji tentang Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, menemukan bahwa secara parsial variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM. Secara simultan seluruh variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap IPM dan mempunyai pengaruh yang di tunjukan melalui R<sup>2</sup> sebesar 80.78% menunjukkan bahwa variabel kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan variabel Y, sisanya 19.22 % dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.
- Pake dkk (2018) yang mempelajari tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan memiliki tanda positif namun kurang berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki tanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara

bersama-sama pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan bertanda positif dan berpengaruh secara signifikan.

- Laode Dkk (2020) mengkaji tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara bersama-sama hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- Herdiansyah dkk (2020) meneliti tentang Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia, menemukan bahwa Komponen dan sektor-sektor indeks pembangunan manusia meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak menjadi menjadi suatu perhitungan dalam peningkatan indeks pembangunan manusia, sektor pendidikan sebagai sektor yang dapat dibilang menjadi sektor utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini tentunya harus menjadi sektor yang paling signifikan dan dari tahun ke tahun harus mengalami peningkatan agar supaya pembanguna bidang pendidikan bisa menjadi faktor utama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia, khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tanpa mengesampingkan sektor lainnya, antara sektor kesehatan dan sektor standar hidup layak, karena kesehatan dan standar hidup layak juga menjadi cermin sejahtera atau tidaknya suatu daerah dengan kesehatan dan standar hidup layak masyarakatnya.
- Mahendra (2020) yang meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia, menemukan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor



Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi dan Kemiskinan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan. Hasil lainnya adalah Variabel Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi berpengaruh nyata secara parsial sedangkan variabel Kemiskinan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia.

- Susanti (2020) mengkaji tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, menemukan bahwa Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- Syahrani (2018) yang mempelajari tentang Pengaruh Kemiskinan, Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, menemukan bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan Variabel kesehatan dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).
- Maryozi dkk (2022) yang mengkaji tentang Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menemukan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), artinya belanja pendidikan dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sektor kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), artinya belanja kesehatan dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemudian Infrastruktur jalan berpengaruh positif

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), artinya infrastruktur jalan dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

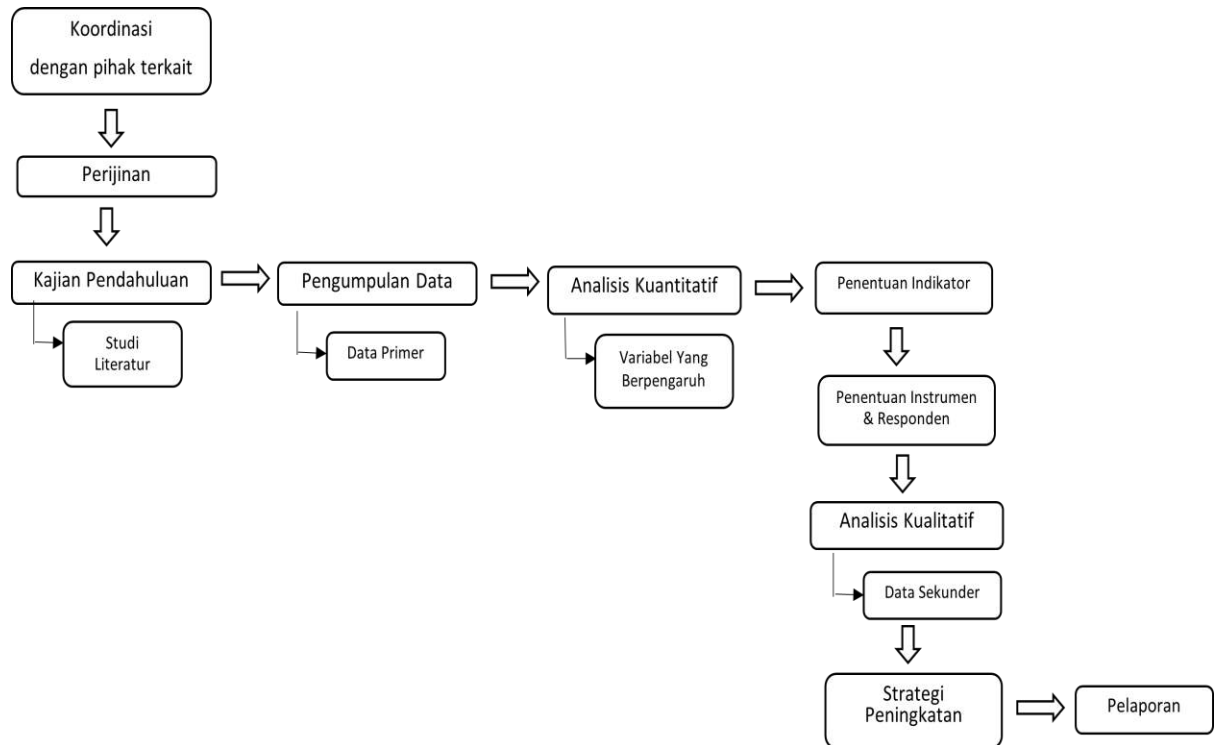
## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjar mulai bulan Maret hingga bulan Juni 2022.

### 3.2. Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan flow chart berikut ini:



Gambar 3. Flow Chart Pelaksanaan Penelitian

### 3.3. Metode Kajian

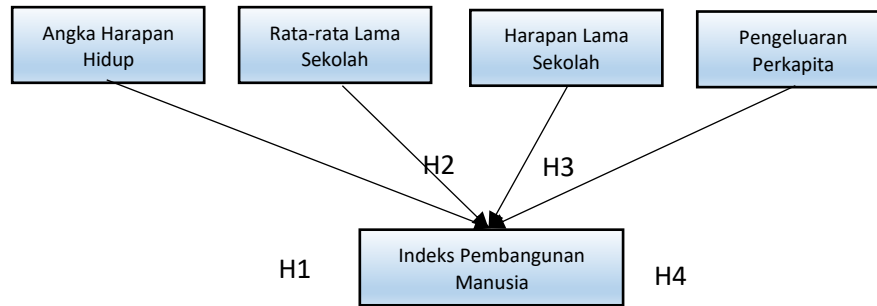
Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif dengan metodologi kajian berupa analisis data primer, data sekunder dan wawancara. Selanjutnya dideskripsikan secara kuantitatif- kualitatif. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah :

- a. Analisis pengaruh variabel AHH, RLS, HLS, APP terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar

- b. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar
- c. Analisis strategi di sektor pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar.

### 3.4. Model Penelitian

Model penelitian kuantitatif yang akan digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 4. Model Penelitian**

Tehnik Pengumpulan data Kualitatif yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi setelah itu dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 3.5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

- (a) Data primer yang bersumber dari wawancara dengan pihak masyarakat dan pelaku usaha.
- (b) Data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik kabupaten Banjar, Dinas Pendidikan Kab. Banjar dan Bappeda Litbang Kabupaten Banjar. Data yang digunakan antara lain adalah data kuantitatif yang terdiri dari data-data sebagai berikut Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Rata-rata Lama Sekolah

(RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (APP), dan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan mixed method yaitu kuantitatif dan kualitatif . Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini antara lain adalah sebagai berikut :

#### A. Analisis Kuantitatif

Dalam analisis kuantitatif, teknik analisis yang digunakan adalah SEM Partial Least Square, untuk menentukan pengaruh variabel AHH, RLS, HLS, dan APP terhadap IPM Kabupaten Banjar dengan menggunakan data BPS periode tahun 2010-2021 dengan Hipotesis-hipotesis sebagai berikut :

- a) H<sub>1</sub> : Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- b) H<sub>2</sub> : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- c) H<sub>3</sub> : Harapan Lama Sekolah berpengaruh (HLS) signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- d) H<sub>4</sub> : Angka Pengeluaran Perkapita (APP) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Sedangkan Persamaan kuantitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

- 1. Uji F :  $IPM = \beta_0 + \beta_1 AHH + \beta_2 RLS + \beta_3 HLS + \beta_4 APP + \varepsilon$   
.....(1)
- 2. Uji t :  $IPM = \beta_0 + \beta_1 AHH + \varepsilon$  .....(2)  
 $IPM = \beta_0 + \beta_2 RLS + \varepsilon$  .....(3)  
 $IPM = \beta_0 + \beta_3 HLS + \varepsilon$  .....(4)  
 $IPM = \beta_0 + \beta_4 APP + \varepsilon$  .....(5)

## **B. Analisis Data Kualitatif**

Data yang sudah diperoleh melalui penelitian kuantitatif kemudian diperkuat dengan penelitian kualitatif guna mempertegas temuan-temuan yang ada pada analisis data kuantitatif terkait dengan Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap IPM dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IPM kabupaten Banjar dari sektor pendidikan.

### **1. Desain Kualitatif**

Desain pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena data yang diperoleh dari pengalihan secara kualitatif dimaksudkan sebagai data sekunder yang memperkuat temuan hasil data kuantitatif, sehingga apa yang diperoleh dari penelitian kuantitatif diperkuat dan diperdalam dengan pengalihan dan analisis kualitatif

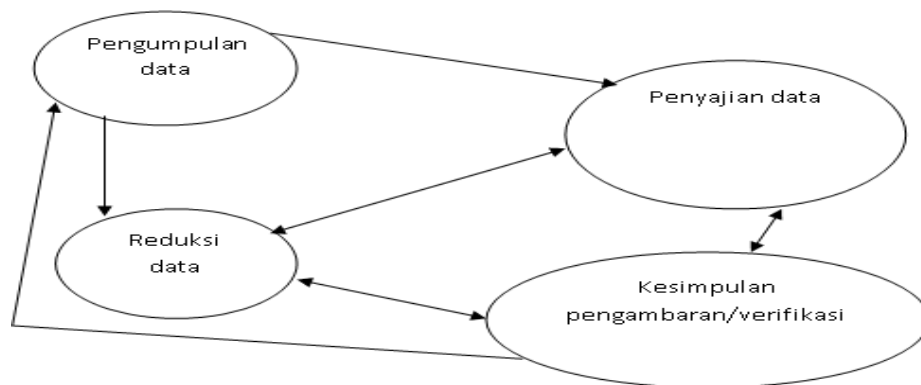
### **2. Pengumpulan Data Kualitatif**

Walaupun data kualitatif dalam penelitian ini nantinya hanya merupakan data sekunder tetapi pengalihan data yang dilakukan tetap menggunakan kaidah-kaidah yang ilmiah dengan melalui berbagai alat pengalihan data yakni Observasi, Wawancara dan dokumentasi terkait temuan-temuan data hasil dan analisis kualitatif.

### **3. Keabsahan Data Kualitatif**

Dalam pengalihan data sekunder pada pendekatan kualitatif deskriptif tetap memperhatikan tehnik keabsahan data melalui triangulasi data, dengan triangulasi sumber yakni mengalihan data dari berbagai pihak yang dirasa mampu untuk dapat menjelaskan mengenai pengaruh indikator pendidikan sebagai daya ungkit peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Banjar

Tehnik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendapat Miles dan Huberman (1994) mengemukakan bahwa analisis data (*data Analysis*) terdiri atas tiga sub-proses yang saling terkait. Reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi.



**Gambar 4.** Model Penelitian Kualitatif

Sedangkan Kisi-Kisi Instrumen Kualitatif (Data Sekunder) yang menjadi acuan pelaksanaan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

Indikator	Sub Indikator
Faktor yang Mempengaruhi IPM	a. Harapan Lama Sekolah b. Angka Pengeluaran
Strategi Peningkatan IPM	a. Pemerataan Pendidikan b. Peningkatan Mutu dan Daya Saing c. Penguatan Tata Kelola

Hasil analisis kualitatif selanjutnya akan di plot dalam Matriks SWOT Analysis yang bertujuan untuk merumuskan hasil kajian dengan mempertimbangkan Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman yang disajikan dalam bentuk matriks (S-O, S-T, W-O, W-T *strategy*) yang selanjutnya akan dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan. Berikut adalah gambaran matriks SWOT yang akan digunakan :

	<b>Kekuatan – S</b> Kekuatan	<b>Kelemahan – W</b> Kelemahan
<b>Peluang – O</b> Peluang	<b>Strategi S-O</b> Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<b>Strategi W-O</b> Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

<b>Ancaman – T</b> Ancaman	<b>Strategi S-T</b> Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	<b>Strategi W-T</b> Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
-------------------------------	---	--

**Gambar 5. Matriks SWOT**



## BAB 4. HASIL KAJIAN

### 4.1.Deskriptif Kuantitatif

#### a. Data Utama

Data utama yang digunakan adalah AHH, RLS, HLS dan Pengeluaran perkapita periode tahun 2010- 2020 dan disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel. 6. Rekapitulasi AHH RHS, HLS dan Pengeluaran perkapita periode tahun 2010- 2020**

No	Tahun	AHH	RLS	HLS	PP
1	2010	64,94	6,86	10,34	11.753
2	2011	65,05	6,89	10,46	11.844
3	2012	65,17	6,93	10,57	11.921
4	2013	65,27	6,96	10,72	11.984
5	2014	65,32	6,96	10,99	12.004
6	2015	65,97	6,99	11,16	12.185
7	2016	66,17	7,00	11,41	12.311
8	2017	66,38	7,28	11,76	12.366
9	2018	66,66	7,29	11,99	12.571
10	2019	66,97	7,34	12,28	12.681
11	2020	67,21	7,35	12,44	12.603
12	2021	67,41	7,52	12,73	11.753

#### b. Data Pendukung

Data pendukung adalah data pertumbuhan indikator-indikator IPM seperti AHH, RLS, HLS dan APP Kabupaten Banjar periode Tahun 2010-2021 yang disajikan pada tabel-tabel berikut ini

**Tabel 7. Pertumbuhan Indikator IPM Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010-2021**

No	Tahun	% AHH	% RLS	% HLS	% PP
1	2010	-	-	-	-
2	2011	0,17%	0,44%	1,16%	0,77%
3	2012	0,18%	0,58%	1,05%	0,65%
4	2013	0,15%	0,43%	1,42%	0,53%

No	Tahun	% AHH	% RLS	% HLS	% PP
5	2014	0,08%	0,00%	2,52%	0,17%
6	2015	1,00%	0,43%	1,55%	1,51%
7	2016	0,30%	0,14%	2,24%	1,03%
8	2017	0,32%	4,00%	3,07%	0,45%
9	2018	0,42%	0,14%	1,96%	1,66%
10	2019	0,47%	0,69%	2,42%	0,88%
11	2020	0,36%	0,14%	1,30%	-0,62%
12	2021	0,30%	2,31%	2,33%	0,83%
	<b>Rata-rata</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,85%</b>	<b>1,91%</b>	<b>0,71%</b>

Angka Harapan Hidup (AHH) kabupaten Banjar periode tahun 2010-2021 secara rata-rata tumbuh sebesar 0.34% dan menempati peringkat ke-4 dari 13 Kabupaten di Propinsi Kalsel (Tabel 8).

**Tabel 8. Pertumbuhan Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010-2021**

No	Nama Kabupaten	Rata-rata % Pertumbuhan AHH (Thn 2010-2021)
1	Hulu Sungai Selatan	0,45%
2	Hulu Sungai Utara	0,40%
3	Hulu Sungai Tengah	0,36%
<b>4</b>	<b>Banjar</b>	<b>0,34%</b>
5	Barito Kuala	0,32%
6	Tanah Bumbu	0,25%
7	Tapin	0,24%
8	Tanah Laut	0,22%
9	Balangan	0,20%
10	Kota Banjarmasin	0,20%
11	Kotabaru	0,18%
12	Tabalong	0,18%
13	Kota Banjar Baru	0,14%

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS ) kabupaten Banjar periode tahun 2010-2021 secara rata-rata tumbuh sebesar 0.85% dan menempati peringkat ke-13 dari 13 Kabupaten di Propinsi Kalsel (Tabel 9).

**Tabel 9. Pertumbuhan Angka Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010-2021**

No	Nama Kabupaten	Rata-rata % Pertumbuhan RLS (Thn 2010-2021)
1	Barito Kuala	2,62%
2	Balangan	2,37%

No	Nama Kabupaten	Rata-rata % Pertumbuhan RLS (Thn 2010-2021)
3	Hulu Sungai Utara	2,01%
4	Tabalong	1,88%
5	Kota Banjarmasin	1,69%
6	Kotabaru	1,63%
7	Tanah Bumbu	1,61%
8	Tapin	1,47%
9	Hulu Sungai Tengah	1,42%
10	Tanah Laut	1,37%
11	Kota Banjar Baru	0,92%
12	Hulu Sungai Selatan	0,91%
<b>13</b>	<b>Banjar</b>	<b>0,85%</b>

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS ) kabupaten Banjar periode tahun 2010-2021 secara rata-rata tumbuh sebesar 1.91% dan menempati peringkat ke-1 dari 13 Kabupaten di Propinsi Kalsel (Tabel 10).

**Tabel 10. Pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010-2021**

No	Nama Kabupaten	Rata-rata % Pertumbuhan HLS (Thn 2010-2021)
<b>1</b>	<b>Banjar</b>	<b>1,91%</b>
2	Tanah Laut	1,85%
3	Hulu Sungai Utara	1,79%
4	Balangan	1,71%
5	Tanah Bumbu	1,71%
6	Hulu Sungai Selatan	1,59%
7	Tabalong	1,51%
8	Kota Banjarmasin	1,48%
9	Tapin	1,35%
10	Kotabaru	1,31%
11	Barito Kuala	1,11%
12	Hulu Sungai Tengah	1,00%
13	Kota Banjar Baru	0,40%

Angka Pendapatan Perkapita Yang Disesuaikan (APP) kabupaten Banjar periode tahun 2010-2021 secara rata-rata tumbuh sebesar 1.91% dan menempati peringkat ke- 13 dari 13 Kabupaten di Propinsi Kalsel (Tabel 11).

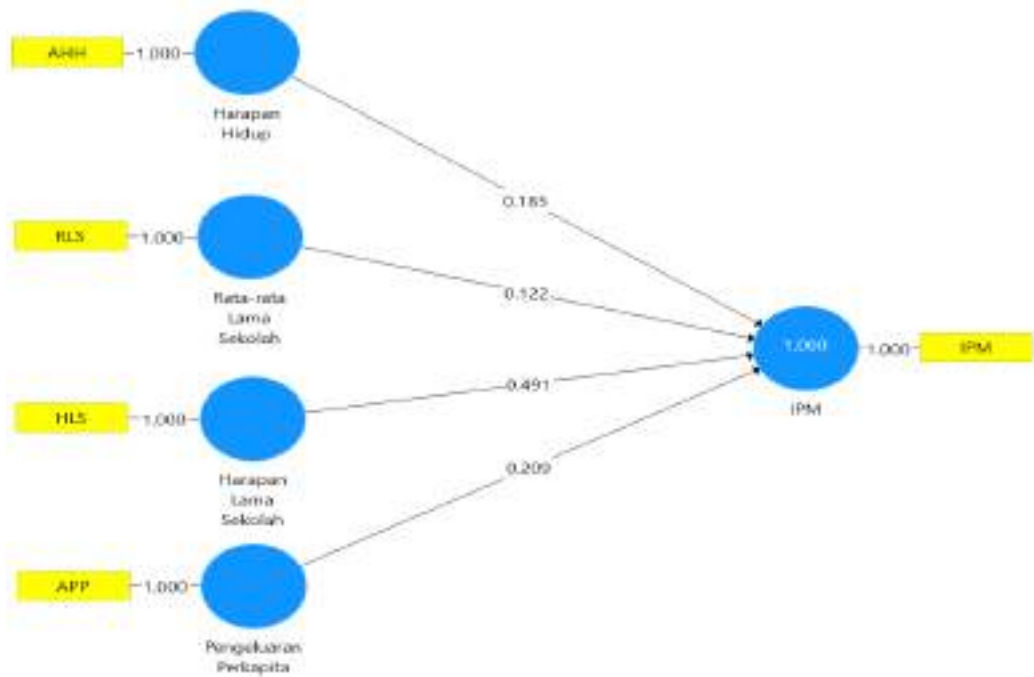
**Tabel 11. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Yang Disesuaikan Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010-2021**

No	Nama Kabupaten	Rata-rata % Pertumbuhan PP (Thn 2010-2021)
1	Hulu Sungai Utara	1,99%
2	Hulu Sungai Selatan	1,82%
3	Tabalong	1,77%
4	Kota Banjarmasin	1,57%
5	Tanah Laut	1,56%
6	Hulu Sungai Tengah	1,48%
7	Kotabaru	1,38%
8	Barito Kuala	1,33%
9	Kota Banjar Baru	1,32%
10	Tapin	1,14%
11	Tanah Bumbu	1,03%
12	Balangan	0,80%
<b>13</b>	<b>Banjar</b>	<b>0,71%</b>

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan indikator IPM Kabupaten, maka ada 2 indikator yang pertumbuhannya jauh dibawah pertumbuhan indikator IPM kabupaten lainnya propinsi Kalsel yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pendapatan Perkapita Yang Disesuaikan.

#### **4.2. Hasil Analisis SEM-PLS (Structural Equation Model - Partial Least Square)**

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan Structural Equation Model (SEM) berbasis komponen atau varians Partial Least Square (PLS). Model penelitian yang didapatkan dari penelitian ini disajikan pada gambar berikut ini.



**Gambar 6. Model Penelitian SEM-PLS**

**a. Uji t**

Pengujian ini dilakukan dengan uji t two-tailed dengan tingkat signifikansi P Values 0,05 (5%) untuk menguji hipotesis – hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis akan diterima jika memiliki t-test lebih besar dari 1,96 dan P Values dibawah 0,05 (Subiyakto et.al.2015; Gutierrez et.al.2015; Nugroho et.al.2016). Hasil uji t-test terhadap indikator-indikator pembentuk IPM Kab. Banjar disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 12. Hasil Uji t-test**

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T-Statistik ( O/STDEV )	P Values
AHH → IPM	0,185	0,241	0,105	1,004	0,316
RLS → IPM	0,122	0,134	0,115	1,057	0,291
HLS → IPM	0,491	0,412	0,214	2,292	0,022 <sup>*)</sup>
APP → IPM	0,209	0,201	0,0076	2,759	0,006 <sup>*)</sup>

Sumber: Data Sekunder, 2022

\*) Signifikan pada taraf 5%

Hasil t-test menunjukkan bahwa ada 2 faktor yang memiliki nilai t-test diatas 1,96 dan P Values atau tingkat signifikansi yang dipersyaratkan dibawah 0,05 yaitu pengaruh HLS dan APP, dan terdapat 2 (dua) hipotesis yang nilai P

Value berada di atas 0,05 yaitu pengaruh AHH dan RLS terhadap IPM dengan nilai P values masing-masing 0,316 dan 0,291.

**b. Uji F**

Uji F dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh indikator pembentuk IPM secara keseluruhan dan melihat koefisien determinasi sebagai ukuran kekuatan pengaruh indikator terhadap IPM. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 13. Hasil Uji F**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	1.000 <sup>a</sup>	1.000	1.000	.03714	1.000	7094.478	4	7	.000

Berdasarkan hasil uji F, maka dapat dikatakan bahwa indikator pembentuk IPM seperti AHH, RLS, HSL dan APP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM Kab. Banjar karena nilai signifikansi sebesar  $(0.000) < 0.05$ . Dengan koefisien determinasi (R Squared Change) sebesar 1.000, maka dapat dikatakan bahwa variansi nilai IPM, 100% dipengaruhi oleh indikator-indikator pembentuknya dan tidak dipengaruhi oleh indikator-indikator di luar indikator pembentuk IPM.

**c. Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak dan melihat model penelitian (path model). Pengujian hipotesis mensyaratkan tingkat signifikansi dapat dilihat pada nilai P value pada tingkat signifikansi dibawah 0,05 dan hasil uji t-test diatas 1,96. Berikut ini adalah hasil penelitian untuk pengujian hipotesis.

**Tabel 14. Hasil Uji Hipotesis**

No	Hipotesis	Pengaruh	t-test	P Values	Kesimpulan
1	H1	AHH → IPM	1,004	0,316	Tidak Berpengaruh
2	H2	RLS → IPM	1,057	0,291	Tidak Berpengaruh
3	H3	HLS → IPM	2,292	0,022 <sup>*)</sup>	Berpengaruh
4	H4	APP → IPM	2,759	0,006 <sup>*)</sup>	Berpengaruh

Sumber: Data Sekunder, 2022

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kab. Banjar karena nilai  $t < 1,96$  (1,004) dan nilai P value di atas 0,05 (0,316).
- 2) Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kab. Banjar karena nilai  $t < 1,96$  (1,057) dan nilai P value di atas 0,05 (0,291).
- 3) Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kab. Banjar karena nilai  $t > 1,96$  (2,292) dan nilai P value di bawah 0,05 (0,022).
- 4) Indikator Angka Pengeluaran Yang Disesuaikan (APP) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kab. Banjar karena nilai  $t > 1,96$  (2,759) dan nilai P value di bawah 0,05 (0,006).

#### d. Hasil Uji Kontribusi

Uji kontribusi dilakukan dengan mengamati besaran korelasi yang dihasilkan dari hubungan antar latent variabel yang dianalisa dan disajikan sesuai tabel berikut ini:

**Tabel 15. Hasil Uji Kontribusi**

	IPM	Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Perkapita
<b>IPM</b>	1,000	0,994	0,998	0,973	0,989
<b>Harapan Hidup</b>	0,994	1,000	0,992	0,953	0,986
<b>Harapan Lama Sekolah</b>	0,998	0,992	1,000	0,972	0,982
<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>	0,973	0,953	0,972	1,000	0,942
<b>Pengeluaran Perkapita</b>	0,989	0,986	0,982	0,942	1,000

Berdasarkan hasil uji kontribusi di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu tahun 2010-2021, Urutan indikator yang paling berkontribusi terhadap IPM Kab. Banjar dari yang paling besar adalah : (1) Harapan Lama Sekolah, (2) Angka Harapan Hidup, (3) Pengeluaran Per Kapita dan (4) Rata-rata Lama Sekolah.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perhatian Pemkab. Banjar selama kurun waktu tahun 2010-2021 lebih banyak difokuskan kepada indikator HLS, HH dan APP dibandingkan indikator RLS (indikator dengan kontribusi paling kecil).

#### **4.3. Implikasi Hasil Analisa Kuantitatif**

Berdasarkan hasil analisa kuantitatif dengan SEM-PLS, maka terdapat 2 indikator yang berpengaruh terhadap IPM Kab. Banjar yaitu indikator HLS dan APP. Sedangkan hasil uji kontribusi menunjukkan bahwa indikator AHH memiliki tingkat kontribusi ke-2 terbanyak meskipun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kab. Banjar.

Berdasarkan hasil pengujian ini maka dapat dikatakan bahwa untuk perbaikan dan meningkatkan angka IPM Kab. Banjar dapat dilakukan melalui indikator yang masih memiliki angka kontribusi relatif kecil yaitu RLS (Rata-rata lama Sekolah).

#### **4.4. Deskriptif Kualitatif**

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif tersebut diatas kemudian diperkuat dengan data kualitatif. Dari 2 indikator yang berpengaruh terhadap IPM Kabupaten Banjar yakni HLS dan APP. Sementara indikator AHH memiliki kontribusi walaupun tidak terlalu signifikan sehingga dalam upaya perbaikan dan peningkatan IPM dapat dilakukan dengan melihat Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Keunikan yang ada pada Kabupaten Banjar dibandingkan dengan kota/kabupaten lain adalah jumlah pondok pesantren yang sangat banyak yakni berjumlah 38 Pondok yang terdaftar dan masih banyak lagi yang sedang didata sehingga sebagian besar berpengaruh terhadap lama sekolah karena dalam menghitung rata-rata lama sekolah ukurannya adalah pendidikan formal, sementara di Kabupaten Banjar masih ada Pondok yang belum ada sekolah formal dan pendidikan



kesetaraan.

Dari 38 jumlah pondok yang terdata hanya 26 pondok yang melaksanakan pendidikan kesetaraan itupun masih belum maksimal sehingga banyak permasalahan yang muncul akibat dari masih banyaknya santri yang belum terdata memiliki pendidikan formal di kabupaten Banjar.

#### **4.4.1. Peran pemangku Kebijakan dalam Peningkatan IPM Pendidikan**

Peran pemangku kebijakan dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Banjar merupakan hal yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan pemerataan pendidikan. Kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi geografis kabupaten banjar yang sangat luas dan melihat letak sekolah yang menyebar diberbagai pelosok kecamatan dan desa.

Menurut Ibu Liana Penny, selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banjar, kondisi geografis dan luasnya wilayah sampai masih diakui menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Banjar, kebijakan yang telah dilakukan selama ini untuk percepatan pemerataan adalah melalui beberapa kegiatan diantaranya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan mendatangkan guru-guru untuk melakukan pendampingan dan kegiatan pamong belajar, sedangkan untuk pemberian beasiswa dan transport melalui bis sekolah belum bisa dilakukan.

Kebijakan lainnya terkait dengan pemerataan pendidikan menurut Liana Penny yakni dengan,

“Adanya kebijakan pengangkatan guru P3K dan Tenaga Kontrak dengan sasaran ditempatkan di daerah yang terpencil seperti daerah perbatasan dan sungai pinang, tetapi sampai saat ini faktanya kuota guru program P3K sebagai juga masih belum terisi sesuai kouta dari 917 formasi hanya sekitar 400 an kouta guru tenaga P3K dan Kontrak yang terisi”.

Pendidikan formal selalu di dorong untuk semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan IPM Kabupaten Banjar, tetapi yang juga patut diperhatikan adalah keberadaan pesantren yang cukup besar juga dapat mempengaruhi angka lama sekolah sehingga sudah seharusnya juga menurut Penny,

“sekolah Non Formal melalui pendidikan kesetaraan juga harus selalu diperhatikan mengingat banyaknya anak usia sekolah yang tidak terdata pada pendidikan formal justru berada pada sekolah pondok dan juga masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Banjar.

Banyak anak yang belum terdata dan masih adanya anak yang putus sekolah maka Selama ini kebijakan yang dilakukan adalah dengan PKBM dan pelaksanaannya ada pada tempat-tempat yang menyang rawan putus sekolah sehingga kegiatan PKBM diharapkan mampu memfasilitasi mereka yang mau sekolah tetapi juga tetap bisa masih bisa membantu orang tuanya mereka bekerja.



**Gambar 7.** Wawancara bersama Liana Penny (Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar)

Upaya yang dilakukan terkait pemerataan pendidikan juga adanya sinergi antara Dinas Pendidikan dan Departemen Agama kabupaten Banjar. Menurut kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar Najwan Noor menjelaskan bahwa sudah banyak strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan IPM diantaranya dengan;

“Pemberdayaan pondok pesantren dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah dilakukan walaupun masih ada pondok yang masih dalam tahap perencanaan, dikarenakan perbedaan

persepsi antara mereka yang sekolah pada jenjang formal dan jenjang pesantren, pada dasarnya mereka yang melanjutkan ke pesantren harus dikatakan mereka bersekolah tetapi tidak berada pada jenjang pendidikan formal sehingga terkadang tidak menjadi indikator perhitungan dalam IPM di Kabupaten Banjar”.

Diharapkan mereka yang bersekolah pada pondok pesantren juga masuk dalam perhitungan BPS karena selama ini ukuran yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal sementara mereka yang ada pada pendidikan pesantren juga mengenal tingkatan-tingkatan dan jejanjang pendidikan termasuk pendidikan kesetaraan tetapi model yang digunakan berbeda ada Ula setingkat dengan Sekolah Dasar (SD), ada Usto setingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta ada Ulya setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara untuk penyelenggaraan pendidikan Non formal di Dinas Pendidikan dinamakan PKBM, sedangkan di pondok Pesantren Ula,Usto dan Ulya.

Jumlah total santri yang terdata di Departemen Agama Kabupaten Banjar dari 38 Pondok pesantren di Kabupetan Banjar berjumlah 18.210 orang santri dan yang sudah mengikuti pendidikan kesetaraan berjumlah 7.438 orang santri, sehingga masih ada 10.772 santri yang belum mengikuti pendidikan kesetaraan dengan berbagai macam alasan.



**Gambar 8.** Wawancara bersama Bapak Najwan Noor (Kepala Departemen Agama Kabupaten Banjar)

Pernyataan yang disampaikan kepala Departemen Agama diperkuat oleh Saufi selaku Kepala Seksi Pesantren Kabupaten Banjar bahwa;

“Saat ini karena sudah ada regulasi dan Kebijakan di Departemen Agama sehingga mereka yang mengikuti pendidikan kesetaraan di PKBM juga mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itupun dengan regulasi yang baru berjalan, sebelum adanya dana BOS pada pendidikan kesetaraan pondok-pondok ini yang menyebabkan mereka tidak berani menyelenggarakan pendidikan kesetaraan akibat tidak jelasnya pembiayaan terkait dana untuk pengajihan guru dan kegiatan lainnya”.

Alasan yang paling prinsip dari beberapa pondok tidak menyelenggarakan pendidikan kesetaraan adalah tidak mau disibukan dengan kegiatan PKBM, sementara alasan orang tua yang biasa adalah cukup saja anak tamat SD sisanya di Sekolah Pondok, ada juga yang orientasi orang tua yang ingin memberangkatkan anaknya sekolah pondok di Jawa dan luar negeri seperti Yaman dan lainnya. Sebagai contoh misalnya ada pondok pesantren Annur orientasinya timur tengah mereka sama sekali tidak mengikuti pendidikan formal maupun kesetaraan.



**Gambar 9.** Wawancara bersama Bapak Saufi (Kepala Seksi Pesantren Depag. Kabupaten Banjar)

Menurut Saufi kembali menjelaskan bahwa;

“kenapa IPM Kabupaten Banjar tergolong rendah di banding Daerah lain, karena dari sekitar 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar tidak semua ada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) misalnya daerah kecamatan Aranio, kecamatan cintapuri Darussalam, serta kecamatan telaga bauntung sampai saat ini tidak memiliki Sekolah SMA. Kemudian juga kemana IPM Rendah di Kabupeten Banjar karena yang menjadi patokan perhitungan di BPS adalah pendidikan formal bukan pendidikan Pondok dan tidak di nilai mereka sekolah”.

Apa yang disampaikan saufi dipertegas dengan pernyataan Sa’duddin bahwa

“di Desa Rantau Balai Kecamatan Aranio, sistem yang ada pada pondok hidayatutthalibin belajar dengan sistem pondok tradisional pada umumnya, santri yang ada pada pondok Hidaytutthalibin hanya sampai pada jenjang wustha atau setara madrasah tsanawiyah, dengan beberapa mata pelajaran umum yang diselipkan untuk bekal mengikuti ujian penyetaraan, untuk ijazah pendidikan setingkat tsanawiyah setara Paket B untuk pendidikan kesetaraan ujian nasionalnya mereka megikuti penyetaraan di daerah lain”.

Selama ini mereka mengikuti progam penyetaraan Paket B di Kecamatan

Gambut dan daerah lain yang mengadakan ujian kesetaraan kemudian Setelah lulus dari jenjang Wustha pada umumnya mereka melanjutkan pada jejang Ulya setara pendidikan Madrasah Alaiyah setara dengan SMA harus mengikuti pendidikan diluar Kecamatan, pada umumnya mereka melanjutkan ke pondok pesantren Darussalam di Martapura.

Berbagai macam persoalan pendidikan kesetaraan merupakan tantangan yang sangat besar dalam upaya pemerataan pendidikan termasuk pada pondok yang sudah tergolong cukup lama seperti Al Mursidul Amin yang sudah sejak menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dimulai pada tahun 2000, sehingga termasuk pondok yang awal-awalnya terbuka pada program pendidikan kesetaraan bahkan sebelum adanya SK resmi pada tahun 2003, sehingga Al Mursidul Amin bisa dikatakan pondok yang mempelopori adanya pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren di Kabupaten Banjar.

Mursyidi selaku Pengelola pendidikan kesetaraan dipondok Al Mursidul Amin menyatakan bahwa

“Pada pondok Al Mursidul Amin rata-rata mereka yang sudah lulus sekolah Dasar (SD), sehingga otomatis mereka masuk kategori Wustha, mereka yang masuk awalnya lulus setara sekolah menengah pertama masuk pada kategori Ulya. Dari sekitar 1700an siswa yang ada pada pondok Al Mursidul Amin hampir keseluruhan mengikuti program kesetaraan, karena pada penyelenggaraannya antara apa yang dilaksanakan di pondok berbeda yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Melalui PKBM, Pondok karena dibawah naungan Kemenag berjejang selalu ada murid ketika awal masuk di pondok sudah otomatis juga didaftarkan pendidikan kesetaraan”.

Mursyidi menambahkan mengenai tidak adanya paksaan kepada para santri untuk mengikuti pendidikan kesetaraan,

“Pada dasarnya dipondok Al Mursidul Amin tidak ada kewajiban harus mengikuti pendidikan kesetaraan, tetapi kalau berminat untuk pendidikan kesetaraan dibuka seluas-luasnya peluang bergabung pada jejang pendidikan kesetaraan. Karena anak dipondok tidak terlepas dari arahan orang tua, ketika orang tua hanya mau anaknya mengejar pendidikan agamanya saja silahkan dan pondok tetap menyiapkan fasilitas kalau berminat pada pendidikan kesetaraan silahkan jika bisa dipersentasikan mereka yang tidak ikut pendidikan penyeteraan sekitar 10% dari jumlah

siswa yang ada di Pondok Al Mursidul Amin”.



**Gambar 10.** Wawancara bersama Mursyidi dan Guru Rasyid (Pengelola Pondok Al Mursidul Amin)

Dari 38 pondok dan ada 26 pondok yang telah melaksanakan pendidikan penyeteraan kesemuanya memang memiliki permasalahan sendiri sendiri baik dari proses sampai pada tahap, sarana maupun sistem yang dilakukan. Pada salah satu Pondok tertua di kabupaten banjar misalnya pondok Darussalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan juga sudah dilaksanakan walau pada awalnya juga banyak adanya penolakan dari para pendiri pondok dan sesepuh pondok mengingat adanya pesan jangan mencampur adukan pendidikan agama dengan pelajaran umum.

Jumlah siswa yang terdata di Pondok pesantren Darussalam berjumlah seitar 12.000 santri dari seluruh tingkatan, dari jumlah tersebut hanya sekitar 2800 santri yang sudah mengikuti pendidikan kesetaraan, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan adalah waktu belajar di pondok yang sudah sangat padat sehingga, pagi untuk waktu belajar santri laki-laki dan siang untuk waktu belajar santri perempuan sehingga dulu waktu pelaksanaan pendidikan kesetaraan dilaksanakan pada hari jumat padahal pada prinsipnya untuk

pembelajaran kesetaraan sama sekali tidak mencukupi waktu kalau dilaksanakan satu hari.

Sebenarnya tidak ada yang salah dalam penyelenggaraan pondok yang tradisional seperti apayang dilakukan di Pondok Darussalam karena Pola pikir masyarakat ketika memasukan anaknya dan menjadi Santri adalah ketika lulus mereka menjadi ulama dengan pendidikan agama yang baik. Sehingga masalah pendidikan umum kadang kala tidak menjadi prioritas karena menurut mereka pendidikan Agama adalah yang paling terpenting. Serta juga ada amanat orang tua terdahulu yang turun temurun dilaksanakan di Pondok Darussalam yakni tidak mencampur adukan pendidikan agam dan pendidikan umum sehingga ada kebijakan tetap dilakuan adanya pendidikan umum melalui pendidikan kesetaraan tetapi dilokasi dan manajemen pendidikan kesetaraan dibedakan.

Pendidikan kesetaraan yang ada adalah merupakan program tersendiri yang berbeda dengan manajemen yang ada pada pondok sehingga ada petugas khusus dan pimpinan yang menangani pada santri yang ikut dalam pendidikan kesetaraan. Kemudian pendidikan kesetaraan yang sudah berjalan di lokasinya berbeda dengan lokasi pondok utama dengan sistem waktu menyesuaikan dengan waktu ada di pondok dan saling bertukar waktu dengan jam belajar pondik dengan pendidikan kesetaraan bak laki-laki dan perempuan sehingga antara program pondok dengan sietem yang sudah berjalan turun temurun tidak terganggu dengan adanya sekolah kesetaraan.

Dijelaskan oleh Zauhari bahwa,

“Untuk pelaksanaan pendidikan kesetaraan pondok Darussalam tidak ada kewajiban santri untuk mengikuti tetapi juga tetap memberikan kebebasan santri untuk memilih jika berminat mengikuti pendidikan kesetaraan dan Jika santri berkeinginan mengikuti pendidikan kejejang pendidikan selanjutnya ketika lulus dari pondok bisa mengikuti pendidikan kesetaraan yang sudah di fasilitasi oleh yayasan”.

Kenapa selama ini belum terdata karena selama ini pendidikan kesetaraan yang telah santri pilih adalah melalui kejar paket baik paket B dan Paket C, sementara untuk peket A pada kenyataanya santri yang ada di pondok Darussalam



awal masuk mendaftar sudah lulus dari pendidikan Sekolah Dasar setara dengan jejang Ula".

Ditambahkan Fahmi, kenapa selama ini santri pondok belum terdata pada data Depag Kab. Banjar walaupun mereka telah mengikuti pendidikan sesetaraan,

“karena memang pada saat itu belum ada pendataan yang dilakukan oleh pondok terhadap santri yang mengikuti pendidikan kesetaraan, pendataan dan permohonan ijin pelaksanaan pendidikan secara resmi pada tahun 2020 yang lalu dan baru mendapat ijin pada 2022 pada tahun ini. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya pendidikan kesetaraan banyak yang melalui PKBM tetapi dari pondok tidak melakukan pendataan santri yang mengikuti program tersebut”.

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan dilaksanakan oleh penanggung jawab yang berbeda dengan pondok Utama, sementara lokasinya pun sudah berbeda dengan pondok utama yang tetap menekankan tujuan awal hanya pelaksanaan pelajaran agama saja, sementara cabang pondok yang melaksanakan pendidikan kesetaraan pada prinsipnya masih dibawah yayasan yang sama tetapi sudah berbeda tempatnya.

Zauhari mengemukakan juga bahwa,

“memang terkadang orang tua yang menitipkan anaknya bersekolah di pondok memang berniat hanya belajar agama saja, tetapi ada juga orang tua menginginkan anaknya tidak hanya belajar agama tetapi ketika lulus juga bisa melanjutkan ke jejanag yang lebih tinggi, dari pondok sendiri sebenarnya pada saat awal pendaftaran pun sudah disampaikan adanya pendidikan kesetaraan tetapi kemungkinan karena lokasinya agak lumayan jauh dari pondok utama sehingga sering kali menjadi kendala bagi santri untuk bisa ikut dalam pendidikan kesetaraan”.

Kepada santri sebenarnya sudah sering kali disosialisasikan mengenai pendidikan kesetaraan tetapi tetap semua pada prinsipnya diserahkan pada wali santri memberikan ruang untuk anak mengikuti pendidikan kesetaraan. Mungkin kedepan perlu juga mensosialisasikan mengenai pendidikan kesetaraan kepada orang tua santri agar ada pemahaman untuk mempertimbangkan anak mereka menempuh pendidikan kesetaraan.

Pondok Pesantren Darussalam sebenarnya terbuka, menerima serta mengikuti program-program dari pemerintah yang ada pada Departemen Agama dan Dinas

Pendidikan di Kabupaten Banjar, termasuk pendidikan kesetaraan hanya saja pendataan secara teratur dan tertata dengan baik baru dimulai pada awal 2020 yang lalu sejak permohonan ijin penyetaraan didaftarkan ke Departemen Agama Kabupaten Banjar.

Zauhari kembali mempertegas bahwa selama ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Pondok Darussalam yang pertama yakni,

“masih adanya pola pikir yang menginginkan agar pendidikan agama tidak dicampur dengan pelajaran umum, kemudian yang kedua adalah jarak yang masih cukup jauh sehingga santri yang ada di pondok utama merasa kesulitan untuk dapat menuju lokasi dilaksanakannya pendidikan kesetaraan. Kendala yang ketiga adalah santri yang sudah kelelahan untuk dapat mengikuti pendidikan kesetaraan arena padatnya belajar di pondok. Kemungkinan ini yang menjadi kendala utama kenapa peminat dan jumlah mereka yang mengikuti pendidikan kesetaraan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan pemerintah Daerah”.

Pondok Darussalam pada dasarnya juga masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat yang menurut informasinya juga menginginkan sistem pendidikan pondok diakui sebagai pendidikan Formal, setara dengan pendidikan lainnya, ini mungkin menjadi angin segar bagi pondok agar juga bisa diakui dalam data yang ada pada pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.



**Gambar 11.** Wawancara bersama M. Zauhari dan M. Fauzi (Wakil

Sekretaris Bidang Komunikasi dan Infomasi dan Operator  
EMIS Kesetaraan Pondok Darusalam)

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir untuk pembiayaan dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan sebagian melalui swadaya diambil dari SPP Pondok dan ada juga yang sudah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dengan adanya kebijakan bahwa sekolah di pondok pesantren dan yang mengelola pendidikan kesetaraan dibolehkan mendapat dana BOS, merupakan wujud keseriusan pemerintah terutama pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan IPM sehingga tidak ada lagi pondok yang merasa tidak di fasilitasi walaupun pelaksanaanya masih belum maksimal.

Pendidikan kesetaraan mendapat dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebelum adanya dana BOS pelaksanaan pendidikan kesetaraan dilakukan swadaya semampunya pondok dan wali santri, karena rata-rata guru yang mengajar pendidikan kesetaraan adalah alumni yang sudah lulus kuliah sarjana dan bahkan ada yang bergelar magister dan memenuhi syarat sesuai dengan keahlian mereka sebagai tenaga pengajar pada sekolah kesetaraan. Karena merasa berasal dari pondok sehingga orientasinya tidak semata meteri tetapi juga ada keinginan untuk mengabdikan di Pondok, dalam 2 tahun terakhir ini semua penyelenggaraan pendidikan kesetaraan termasuk sistem pengajihan guru semua sudah mulai bagus karena bantuan BOS yang sudah maksimal di berikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Depag. Kabupaten Banjar.

Sebelum adanya dana BOS pondok memang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan pendidikan kesetaraan termasuk pelaksanaannya terpaksa di batasi jumlah peserta pendidikan kesetaraan, dengan adanya BOS memang sudah sangat bagus tetapi masih disayangkan dana BOS sering kali terlambat sehingga sedikit banyaknya mengganggu pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Dana bos sering kali baru bisa digunakan pada saat pertengahan tahun sehingga guru-guru kadang kala masih harus bersabar menunggu untuk bisa dibayarkan gajihnya.

Menurut Sa'duddin salah satu guru di pondok Pesantren Hidatutthalibin yang berada di Desa Rantau Balai memberikan penjelasan bahwa,

“pondok hidayatutthalibin juga telah mendapatkan bantuan dana operasional sekolah (BOS) untuk kegiatan operasional pondok walaupun jumlah dana BOS yang di terima masih sangat kecil dan dari dana BOS masih bisa sebagian disisihkan untuk mengajih guru pondok sekitar 10% dari Dana BOS, Karena untuk mengharapkan dana lain seperti SPP dari santri juga tidak terlalu besar yakni antara Rp. 20000 sampai dengan Rp. 25000 ribu SPP yang di pungut setiap santri”.

Guru Sa'duddin menambahkan

“pada dasarnya guru guru yang ada di pondok pesantren pada prinsipnya adalah pengabdian, besaran honor dari pengajar pondok di pondok hidayatutthalibin juga tidak terlalu besar yakni sekitar Rp. 200.000,- setiap bulan sehingga sebagian guru pondok juga masih bekerja bertani disamping kegiatan mengajar. Selama ini ada bantuan insentif yang diberikan pemerintah melalui Departemen Agama sekitar Rp. 100.000,- perbulan dan dibayarkan setiap 6 bulan’.



**Gambar 12.** Wawancara bersama Bapak Sa'Duddin (Guru Pondok Hidayatutthalibin Rantau Balai)

Harapan dari pihak pondok adanya komitmen pemerintah tentang status pendidikan formal dan non formal sehingga jelas santri yang ada pada pondok tidak dianggap putus sekolah kerana pada prinsipnya santri yang ada di pondok juga bersekolah. Jika pondok dipaksa untuk merubah sistem kemungkinan sulit terlaksana, misalnya menambah kurikulum, pemerintah juga harus memperhatikan

keunikan masing-masing pondok yang ada di Kabupaten Banjar. Dikhawatirkan jika pemerintah tetap bersikeras memasukan pendidikan umum masuk dalam pondok pesantren ini akan menjadi masalah yang lain di kemudian hari, Kebijakan yang berjalan selama ini sebenarnya sudah menjadi solusi yang sangat baik siapa yang berminat ikut dalam pendidikan kesetaraan tetap difasilitasi bagi yang tidak mau juga tidak dipaksakan.

Apalagi dengan adanya covid 19 kita sudah harus terbuka, sekolah bukan hanya bisa melalui tatap muka secara online, mudah-mudahan kedepan adanya program pendidikan kesetaraan yang diselengaraan secara online dan tidak ada lagi alasan tidak ikut pendidikan kesetaraan karena lokasi jauh dan lainnya, sehingga diharapkan seluruh siswa bisa mengikuti pendidikan kesetaraan dengan sebaik-baiknya.

#### **4.4.2 Temuan Hasil penelitian**

- a. Rata-Rata lama Sekolah (RLS) di Kabupeten Banjar pada dasarnya masih terus menerus meningkat, disinyalir yang banyak memberi pengaruh terhadap RLS adalah Pondok Pesantren, sementara pondok pesantren selama ini sudah banyak yang terbuka terhadap kebijakan mengenai pendidikan kesetaraan dari 38 Jumlah Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Banjar, Sudah 26 Pondok yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, sisanya masih dalam proses usulan, dan lainnya masih perlu sosialisasi.
- b. Jumlah Peserta pendidikan kesetaraan yang sudah terdata oleh Departemen Agama Kabupaten Banjar sebanyak 18.210 santri, ada sekitar 7.438 santri berada pada jenjang Ula, Wustha, dan Ulya. Terbagi diberbagai jejang pendidikan 915 pada tingkat Ula, 4549 santri pada tingkat Wustha dan 1974 santri dan santriwati yang beada pada jenjang Ulya.
- c. Persentasi jumlah santri yang mengikuti pendidikan kesetaraan masih belum maksimal jika di banding jumlah total santri 18.210 orang santri dibanding dengan jumlah santri kesetaraan 7.438 orang santri yakni sekitar 41 % santri yang sudah mengikuti pendidikan kesetaraan.

- d. Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) sering kali mengalami keterlambatan sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren.
- e. Dana Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah pondok salafiyah di daerah-daerah terpencil misalnya Rantau Balai Kecamatan Aranio belum mampu mencukupi untuk kegiatan operasional pondok apalagi ditambah lagi dengan kegiatan program sekolah penyetaraan.
- f. Sudah ada Sosialisasi dan edukasi yang terus menerus dilakukan baik dari Dinas Pendidikan melalui pendidikan PKBM dan Juga pendidikan Kesetaraan yang dilaksanakan oleh Departemen Agama serta sosialisasi yang dilakukan pondok sehingga masyarakat memiliki kesadaran pentingnya terhadap pendidikan kesetaraan.

#### **4.5. SWOT ANALYSIS**

##### **4.5.1. Kekuatan**

- a. Pengangkatan Guru P3K dan tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan daerah
- b. Program Santri Banjar Sekolah dapat 2 ijazah (sajadah)
- c. Insentif bagi tenaga pengajar pendidikan kesetaraan
- d. Sudah ada 26 Pondok Pesantren yang melaksanakan pendidikan kesetaraan
- e. Pendidikan kesetaraan sudah masuk dalam kategori penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

##### **4.5.2. Kelemahan**

- a. Kondisi geografis kabupaten Banjar yang sangat luas sehingga sebaran sekolah tidak merata di berbagai kecamatan
- b. Belum dimasukkannya santri yang sekolah pondok kedalam perhitungan PBS Kab. Banjar
- c. Masih ada di beberapa kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas (SMA)
- d. Baru 7 pondok dari 26 pondok yang mendapat bantuan dana untuk pembayaran tenaga pengajar

- e. Belum ada regulasi syarat menjadi pejabat publik harus memiliki pendidikan formal di kabupaten Banjar.
- f. Guru yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan masih ada yang dibayar jauh dari apa yang diharapkan yakni antara Rp. 200.000,0 Sampai dengan Rp. 300.000,- dan dibayar dalam waktu setiap 6 bulan.
- g. Guru di beberapa pondok salafiyah dengan sistem penyetaraan masih belum sesuai bidang hanya lulusan pondok dan dengan keterangan pernah belajar pelajaran umum saja dan kebanyakan lulusan Setara SMA.

#### **4.5.3. Peluang**

- a. Pondok semakin terbuka terhadap kebijakan pemerintah daerah dengan penyelenggaraan pendidikan PBM dan Pendidikan Kesetaraan
- b. Jumlah Penerima bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah penyetaraan di Pondok pesantren semakin meningkat
- c. Jumlah pondok yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banjar akan terus mengalami peningkatan, karena beberapa pondok masih melengkapi persyaratan yang ada pada Depatemen Agama Kabupaten Banjar.
- d. Undang-undang pondok pesantren membuka jalan pondok untuk meningkatkan kemandirian sebagai upaya ikut berkiprah tidak hanya pada bidang agama tetapi juga pada bidang umum lainnya.
- e. Kerjasama Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui pemuka agama sudah terjalin dengan baik.
- f. Menambah dan menyediakan lokasi khusus Sekolah penyetaraan di setiap kecamatan yang rawan putus sekolah misalnya kecamatan yang selama ini terisolir.

#### **4.5.4 Ancaman**

- a. Keterlambatan dalam distribusi Bantuan operasional sekolah dan instentif pada pondok pesantren sering kali dirasakan pengelola pondok dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan
- b. Persepsi Masyarakat sekolah kesetaraan merubah tradisi pendidikan

pondok pesantren

- c. Masyarakat masih merasa pendidikan umum dan kesetaraan tidak terlalu penting dibanding dengan pendidikan Agama di pondok.
- d. Sudah ada 26 pondok yang melaksanakan pendidikan kesetaraan, tetapi sekitar baru 7 pondok yang mendapat bantuan honor guru penyetaraan.
- e. Beberapa pondok pesantren masih ada yang mengandalkan pendanaan secara swadaya dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan.
- f. Masih ada daerah yang sampai saat ini kesulitan menggunakan jaringan internet, sehingga kesulitan mengikuti sistem ujian nasional penyetaraan secara online.

#### 4.6. ANALISIS STRATEGI

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, maka dapat disusun strategi dengan menggunakan matriks SWOT yang merupakan kombinasi semua komponen di dalam analisis sebagai berikut :

	<i>Kekuatan – S</i>	<i>Kelemahan – W</i>
<b>Peluang – O</b>	<p><b>Strategi S-O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan anggaran pendidikan untuk insentif tenaga pengajar pendidikan kesetaraan.</li> <li>• Peningkatan Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS)</li> <li>• Penetapan Perda Wajib Belajar 12 Tahun</li> </ul>	<p><b>Strategi W-O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan kebijakan/aturan tentang konversi mata pelajaran dari pesantren ke sekolah formal.</li> <li>• Pendataan status pendidikan terakhir santri pesantren</li> </ul>
<b>Ancaman – T</b>	<p><b>Strategi S-T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan kebijakan yang terintegrasi antara Dinas Pendidikan dengan Departemen Agama.</li> </ul>	<p><b>Strategi W-T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan penyetaraan yang dapat dilakukan dengan sistim daring.</li> <li>• Peningkatan bantuan beasiswa transisi antar jenjang sekolah, khususnya kepada siswa kurang mampu</li> </ul>

**Gambar 13.** Hasil Analisis Strategi



## **BAB 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **5.1. KESIMPULAN**

Hasil kajian yang dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup (AHH) kabupaten Banjar periode tahun 2010-2021 secara rata-rata tumbuh sebesar 0.34% dan menempati peringkat ke-4 dari 13 Kabupaten di Propinsi Kalsel.
2. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS ) kabupaten Banjar periode tahun 2010-2021 secara rata-rata tumbuh sebesar 0.85% dan menempati peringkat ke- 13 dari 13 Kabupaten di Propinsi Kalsel.
3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS ) kabupaten Banjar periode tahun 2010-2021 secara rata-rata tumbuh sebesar 1.91% dan menempati peringkat ke- 1 dari 13 Kabupaten di Propinsi Kalsel.
4. Angka Pendapatan Perkapita Yang Disesuaikan (APP) kabupaten Banjar periode tahun 2010-2021 secara rata-rata tumbuh sebesar 1.91% dan menempati peringkat ke- 13 dari 13 Kabupaten di Propinsi Kalsel.
5. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kab. Banjar karena nilai  $t < 1,96$  (1,004) dan nilai P value di atas 0,05 (0,316).
6. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kab. Banjar karena nilai  $t < 1,96$  (1,057) dan nilai P value di atas 0,05 (0,291).
7. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kab. Banjar karena nilai  $t > 1,96$  (2,292) dan nilai P value di bawah 0,05 (0,022).
8. Indikator Angka Pengeluaran Yang Disesuaikan (APP) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kab. Banjar karena nilai  $t > 1,96$  (2,759) dan nilai P value di bawah 0,05 (0,006).

9. Indikator pembentuk IPM seperti AHH, RLS, HSL dan APP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM Kab. Banjar karena nilai signifikansi sebesar  $(0.000) < 0.05$ . Dengan koefisien determinasi (R Squared Change) sebesar 1.000, maka dapat dikatakan bahwa variansi nilai IPM, 100% dipengaruhi oleh indikator-indikator pembentuknya dan tidak dipengaruhi oleh indikator-indikator di luar indikator pembentuk IPM.
10. Urutan indikator yang paling berkontribusi terhadap IPM Kab. Banjar dari yang paling besar adalah : (1) Harapan Lama Sekolah, (2) Angka Harapan Hidup, (3) Pengeluaran Per Kapita dan (4) Rata-rata Lama Sekolah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perhatian Pemkab. Banjar selama kurun waktu tahun 2010-2021 lebih banyak difokuskan kepada indikator HLS, HH dan APP dibandingkan indikator RLS (indikator dengan kontribusi paling kecil).
11. Peluang Peningkatan IPM melalui usaha meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar masih sangat besar, mengingat sudah sinerginya program yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama dalam komitmen meningkatkan pendidikan dengan berbagai macam kebijakan termasuk penyelenggaraan PKBM dan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren.
12. Jumlah pondok yang sudah melaksanakan pendidikan kesetaraan ada 26 pondok dari seluruh jumlah pondok yang terdata yakni 38 Pondok akan terus mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik kebijakan pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun bantuan insentif guru kesetaraan.
13. Pondok yang paling berpengaruh di Kabupaten Banjar termasuk pondok Darusslam dan Al Mursidul Amin sudah sangat terbuka dengan keberadaan pendidikan kesetaraan baik yang dinaungi oleh Kementrian Agama maupun Dinas Pendidikan melalui KBM, walaupun masih belum ada kewajiban bagi santri untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.
14. Keterbukaan dan pemahaman pondok pesantren dengan adanya program dari pemerintah Daerah sudah sangat baik sekitar 68,4% dari 38 jumlah pondok telah menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang tersebar pada berbagai jejang

pendidikan baik jenjang Ula setara SD, Whusta setara SMP serta jenjang Ulya Setara SMA.

15. Sosialisasi pendidikan kesetaraan atau PKBM yang dilakukan sudah dilakukan secara bertahap dengan berbagai macam pendekatan, cara pandang masyarakat yang unik memang masih memerlukan pendekatan kultur budaya, karena masih adanya pola pikir masyarakat yang tidak ingin mencampurkan pendidikan agama dengan pelajaran umum.

## 5.2. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan IPM kabupaten Banjar melalui dimensi pendidikan khususnya indikator Rata-rata Lama Sekolah, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan
1	Peningkatan anggaran pendidikan untuk insentif tenaga pengajar pendidikan kesetaraan dan Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS)	Pengajuan usulan peningkatan anggaran pendidikan di APBD Kab. Banjar untuk insentif tenaga pengajar pendidikan kesetaraan dan dan BOS
2	Penetapan Perda Wajib Belajar 12 Tahun	Perancangan Perda Wajib Belajar 12 tahun.
3	Pembuatan kebijakan/aturan tentang konversi mata pelajaran dari pesantren ke sekolah formal.	Perancangan Kebijakan konversi mata pelajaran dari pesantren ke sekolah formal
4	Pendataan status pendidikan terakhir santri pesantren	Pendataan berbasis digital
5	Kebijakan terintegrasi antara Dinas Pendidikan dengan Departemen Agama.	Pembuatan kebijakan/pedoman pendidikan yang terintegrasi antara Dinas Pendidikan dan Departemen Agama
6	Pelaksanaan kegiatan penyetaraan yang dapat dilakukan dengan sistim daring.	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan penyetaraan secara daring
7	Peningkatan bantuan beasiswa transisi antar jenjang sekolah, khususnya kepada siswa kurang mampu.	Pengajuan usulan peningkatan anggaran pendidikan di APBD Kab. Banjar untuk transisi antar jenjang sekolah dan siswa kurang mampu.

## Daftar Pustaka

- Ananta, P. 2013. Determinan Pembangunan Manusia Provinsi Lampung. Tesis. FEB Universitas Lampung
- Andriany, E., Harken, A., & Desmaryani, S. (2021, January). STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEKTOR PENGELUARAN PER KAPITA DI PROVINSI JAMBI. In *PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 41-50).
- Bhakti, N.A., Istiqomah, & Suprpto. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 18 (4), 452-492.
- Cahyadi M, P. (2020). Strategi peningkatan indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Manajemen: Untuk Ilmu Ekonomi dan Perpustakaan*, 5(2).
- Ginting, S. C. K., Lubis, I., & Mahalli, K. (2008). Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *WAHANA HIJAU. Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*. 4 (1), 17-24.
- Hariyanto, A. (2006). Percepatan Pengembangan Wilayah melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota (Studi Kasus: Kabupaten Subang). *Jurnal PWK Unisba*. 21-51.
- Hariyanto & Tukidi. (2007). Konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang Indonesia di era otonomi daerah. *Jurnal Geografi*. 4 (1), 1-10.
- Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 8(1).
- Kuncoro, M. (2004). Otonomi & pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi dan peluang.
- Laode, M., Engka, D. S., & Sumual, J. I. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02).
- Mahendra, R., Fariyanti, A., & Falatehan, A. F. (2016). Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan Melalui Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(2).
- Mahendra, A. (2020). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, INFLASI DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 174-186.
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1).

- Maryozi, Z., Isyandi, B., & Aulia, A. F. (2022). Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(1), 1-11.
- Maulana, R. & Bowo, P. A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Teknologi terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011. *Journal of Economics and Policy*. 6 (2), 163-169.
- Melliana, A. & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*. 2 (2), D237–D242.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212-222.
- Niu, S., Jia, Y., Wang, W., He, R., Hu, L., & Liu Y. (2013). Electricity Consumption and Human Development Level: A Comparative Analysis Based on Panel Data for 50 Countries. *Electrical Power and Energy Systems*. 53 (2013), 338-347.
- Northover, P. (2014). Development as freedom. *The companion to development studies*, 33.
- Pratowo, N. I. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*. 1 (1), 15-31.
- Rustariyuni, S. D. (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA*. X (1), 45-55.
- Pake, S. D. S., Kawung, G. M., & Luntungan, A. Y. (2018). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Sarbini & Lina, 2011. *Perencanaan Pendidikan*, Bandung, CV Pustaka Setia
- Sa'ud & Makmun, 2009. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Susanti, E. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *ECO-BUILD; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 4(2), 25-34.
- Suwandi, S. (2019). STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEKTOR KESEHATAN MELALUI PROGRAM “MAWAR ITENG” DI KABUPATEN PEMALANG. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Syahrani, A. (2018). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2014-2016) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Todaro, M. P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 & 2. Jakarta: Erlangga
- Trisanto, A., & Diartho, H. C. (2018). Strategi Sektor Kesehatan Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Situbondo. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 8(2), 86-93.
- Umam, M. K. (2017, May). Strategi Alternatif Memajukan Lembaga Pendidikan Islam di Pedesaan Berbasis Sekolah Excellent Perspektif Kompetitif Kontemporer. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 2, pp. 769-776).
- UNDP. 2000. *Human Right and Human Development*. Human Development Reports 2000. New York: Oxford University Press.
- Usmaliadanti, C., & HANDAYANI, H. R. (2011). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Zulfaizah, Z., Nur, M. A., & Muzdalifah, M. (2020). STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PROGRAM KESEHATAN SEBAGAI PEMBENTUK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. *WELFARE*, 1(2), 90-102.

### Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama / NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/mg)	Uraian Tugas
1	Dr. Nurul Listiyani, SH, MH	Universitas Islam Kalimantan - MAB Banjarmasin	Hukum	10 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasi proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data, dan penyusunan laporan penelitian.</li> <li>- Mengkoordinasi persiapan instrument penelitian, perlengkapan penelitian, dan instrument penunjang.</li> <li>- Mengkoordinasi penyusunan laporan akhir penelitian, publikasi hasil penelitian dalam seminar nasional/ prosiding.</li> <li>- Bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan penggunaan anggaran penelitian</li> </ul>
3	Dr. Achmad Jaelani, SPT, Msi	Universitas Islam Kalimantan - MAB Banjarmasin	Pertanian	8 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu ketua dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data, dan penyusunan laporan penelitian.</li> <li>- Membantu ketua dalam persiapan instrument penelitian dan perlengkapan penelitian.</li> <li>- Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir penelitian, publikasi hasil penelitian dalam seminar nasional/ prosiding.</li> </ul>

					<p>Turut bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan penggunaan anggaran penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
2	Dr. Didi Susanto,SPd, MPd	Universitas Islam Kalimantan - MAB Banjarmasin	Bimbingan dan Konseling	8 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu ketua dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data, dan penyusunan laporan penelitian.</li> <li>- Membantu ketua dalam persiapan instrument penelitian dan perlengkapan penelitian.</li> <li>- Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir penelitian, publikasi hasil penelitian dalam seminar nasional/ prosiding.</li> </ul> <p>Turut bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan penggunaan anggaran penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
4	Rizka Zulfikar, STp, MM	Universitas Islam Kalimantan - MAB Banjarmasin	Manajemen	8 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu ketua dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data, dan penyusunan laporan penelitian.</li> <li>- Membantu ketua dalam persiapan instrument penelitian dan perlengkapan penelitian</li> <li>- Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir penelitian, publikasi hasil penelitian dalam seminar nasional/ prosiding.</li> <li>- Turut bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan penggunaan anggaran penelitian</li> </ul>



## Lampiran 2. Biodata Tim Pelaksana

### Biodata Ketua Peneliti

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Nurul Listiyani, SH, MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	061204607
5	NIDN	1102127301
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Martapura, 2 Desember 1973
7	E-mail	<a href="mailto:nurullistiyani5@gmail.com">nurullistiyani5@gmail.com</a>
8	Nomor Telepon/HP	082350534466
9	Alamat Kantor	Jalan Adyaksa No. 2 Banjarmasin
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = .....orang; S-2 = ... orang; S-3 = ..orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1.
		2.
		3.
		4.

#### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat	Universitas Islam Malang	Universitas Brawijaya Malang
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1994 – 1998	2008-2011	2014-2017
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

#### C. Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

1	2010	Efektifitas pembinaan dalam system pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin dalam usaha mengoptimalkan manfaat bagi narapidana	Kopertis Wilayah XI	
2	2011	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Studi terhadap CSR yang dilaksanakan oleh PT. Adaro Indonesia)	Kopertis Wilayah XI	
3	2011	Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Yang diperlukan Oleh Perusahaan Dalam Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR).	APBU Uniska	6,000,000
4	2012	Disharmoni Perda Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap Beberapa Legislasi Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Daerah.	Kopertis Wilayah XI	
5	2013	Implikasi Normatif dan Sosiologis Dicabutnya Keppres No. 3 tahun 1997 Terhadap Perda No. 27 tahun 2011 Sebagai Payung Hukum Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Banjarmasin.	APBU Uniska	6,000,000
6	2014	Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Dari Sistem Kepenjaraan Ke Sistem Pemasyarakatan.	APBU Uniska	6,000,000
7	2015	Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. 2015.	APBU Uniska	6,000,000

8	2016	Revitalisasi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2016.	PDP-DIKTI	11,600,000
9	2017	Politik Hukum Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	APBU Uniska	6,000,000
10	2017	Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Hukum dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam	APBU Uniska	6,000,000
11	2018	Analisis Terhadap Reklamasi Lahan Tambang dalam Kajian UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	APBU Uniska	6,000,000
12	2018	Rekonstruksi Pengaturan Peran Serta Masyarakat dalam Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.	APBU Uniska	6,000,000
13	2019	Model Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan mineral dan batubara berbasis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Hibah Ristekdikti - Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 1, 2019).	PTUPT-DIKTI	130,534,500
14	2019	Analisis Reklamasi Lahan Tambang dalam Kajian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.	APBU Uniska	7,000,000
15	2020	Model Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan	PTUPT-DIKTI	290,502,000

		mineral dan batubara berbasis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Hibah Ristekdikti - Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2, 2020)		
--	--	---	--	--

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2010	Penyuluhan Hukum mengenai Undang-Undang Kesehatan di Loksado, Hulu Sungai Selatan	APBU Uniska	4,000,000
2	2011	Penyuluhan hukum mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar. (APBU Uniska, 2011)	APBU Uniska	4,000,000
3	2009-Sekarang	Aktif di LKBH Uniska.		
4	2012-2013	Staf ahli pembuatan Naskah Akademik dan Perda Pelayanan Publik Propinsi Kalimantan Selatan		
5	2015-2018	Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kemenkumham Kalsel masa bakti tahun 2015-2018.		
6	2018-2021	Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kemenkumham Kalsel masa bakti tahun 2018-2021.		

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal / Prosiding	Volume/ Nomor/Tahun

1	Memaknai Sanksi Hukum Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)	Jurnal Socioscientia	Volume 5 No. 1 Februari 2013
2	Disharmoni Perda Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap Beberapa Legislasi Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Daerah.	Jurnal Socioscientia	Volume 6 tahun 2013.
3	Implikasi Normatif dan Sosiologis Dicaputnya Keppres No.3 Tahun 1997 Terhadap Perda No.27 tahun 2011 Sebagai Payung Hukum Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Banjarmasin.	Jurnal Al A'dl : Jurnal Hukum	Vol 6 (12), 2014 : <a href="http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/203">http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/203</a>
4	Reconstruction Of Prisoners Development System Into Correctional System.	Jurnal Al A'dl : Jurnal Hukum	Vol 7 (13), 2015 : <a href="http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/210">http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/210</a> .
5	Meaning of Environmental Management Surveillance of Coal Mining in UUPPLH and Mineral and Coal of Law Perspective.	Journal of Law, Policy and Globalization	Vol. 61, 2017 : 98-105 <a href="https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob61&amp;section=16">https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob61&amp;section=16</a>
6	Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara.	Al A'dl : Jurnal Hukum	Vol.9 ( 1), 2017 : 67-86 <a href="http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/803">http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/803</a>
7	Political Law on the Environment: The Authority of the Government and Local Government to File Litigation in Law Number 32 Year 2009 on	Journal Resources	Vol. 7 (4) : 77 <a href="https://www.mdpi.com/2079-9276/7/4/77">https://www.mdpi.com/2079-9276/7/4/77</a>

	Environmental Protection and Management		
8	Konsep Perizinan Terpadu sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsir Sektor Pertambangan	Lambung Mangkurat Law Journal	Vol 3 (1), 2018 : 19-36 <a href="http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/62">http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/62</a>
9	Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam	Media Hukum	Vol. 25 (2) : 217-227 <a href="http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5420">http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5420</a>
10	Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Al-Adl: Jurnal Hukum	Vol. 12 (1), 2020 : 116-130 <a href="https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2650">https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2650</a>
11	Sosialisasi Tentang Kesadaran Kedudukan Wanita Dalam Perkawinan Bagi Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Banjarmasin	Jurnal Pengabdian Al Ikhlas	Vol.5 (1), 2019 : <a href="https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/2367">https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/2367</a>
12	Ketidak-harmonisan rumusan ekosistem gambut dalam perspektif asas kejelasan rumusan (Kajian yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)	Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Basah 2018- Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Vol. 4 No. 3 (2019) : 377-384, <a href="http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/217">http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/217</a>
13	The Model of Supervision of Environment Management in Mineral and Coal Mining	Journal of Law, Policy and Globalization	Vol 88 (2019) : 69-75, <a href="https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob88&amp;section">https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob88&amp;section</a>

			<u>=11</u>
--	--	--	------------

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	<i>International Conference: "Indonesia Clean of Illegal Migrant in 2020" Cross-border Migration and Security Issue between Countries in the Perspective of Comparative Law</i>	Reconstruction of Indonesian Immigrant Migrant Workers in the Study of Law Number 39 Year 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Workers	Tanggal 4 Maret 2017
2	<i>The 1<sup>st</sup> Borneo International Conference On Education and Social Sciences- 2018.</i>	<i>Revitalization of Supervision Againts Local Government Policy In The Protection and Environtmental Management</i>	Tanggal 10 September 2018, Hotel Tree Park Banjarmasin
3	Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Basah - 2019	Ketidak-harmonisan rumusan ekosistem gambut dalam perspektif asas kejelasan rumusan (Kajian yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)	Tanggal 17 Nopember 2019, Hotel Arya Barito Banjarmasin

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	No ISBN	Penerbit
1	Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Batubara	2017		Penakita Publisher
2	Asas Keterpaduan	2019		Penakita Publisher

	Sebagai Dasar Konsep Integrasi Pengawasan Terhadap Pertambangan Mineral Dan Batubara. Universitas Islam Kalimantan.			

#### H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Batubara	2017	Hak Cipta	
2	Asas Keterpaduan Sebagai Dasar Konsep Integrasi Pengawasan Terhadap Pertambangan Mineral Dan Batubara. Universitas Islam Kalimantan.	2019	Hak Cipta	

#### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-	-	-	-

#### J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi/institusi lainnya )

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Penerima Hibah Penelitian DRPM Dikti Skim PDP Tahun anggaran 2016	DRPM Dikti	2016
2.	Penerima Hibah Penelitian DRPM Dikti Skim PTUPT Tahun anggaran 2019	DRPM Dikti	2019



3.	Penerima Hibah Penelitian DRPM Dikti Skim PTUPT Tahun anggaran 2020	DRPM Dikti	2020
----	---	------------	------

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan usulan penelitian.

Banjarmasin, Maret 2022

Ketua,

TTD

**Dr. Nurul Listiyani, SH, MH**

## Biodata Anggota 1

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Achmad Jaelani, S.Pt. M.Si.
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19670107 199403 1 002
5	NIDN	0007016701
6	Author ID citation Scopus	55953835500
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Sukabumi , 7 Januari 1967
9	E-mail	ach_jaelaniborneo @yahoo.com
10	Nomor Telepon/HP	081315933440
11	Alamat Kantor	Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin
12	Nomor Telepon/Faks	0511-3304352
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 55 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
13. Mata Kuliah yg Diampu		1. Ilmu Nutrisi Ternak
		2. Teknologi Pakan
		3. Industri Pakan
		dst

### B. Riwayat Pendidikan

	S1	S 2	S3
Nama Perguruan Tinggi	UNPAD	IPB	IPB
Bidang Ilmu	Peternakan	Ilmu Ternak	Ilmu ternak
Tahun Masuk-Lulus	1988-1993	1995-1999	2001-2007
Judul	Pengaruh Fermentasi Kulit Singkong oleh	Pengkajian Sifat Fisik Kulit Mentah	Hidrolisis Bungkil Inti Sawit oleh

Skripsi/Tesis/Disertasi	Kapang <i>Aspergillus niger</i> terhadap penampilan Ayam Pedaging.	Itik Lokal pada Cara Pemeliharaan yang dan Bagian Tubuh Asal Kulit yang Berbeda serta Pengaruhnya	Kapang Pendegradasi Polisakarida Mannan dan Pengaruhnya Terhadap
-------------------------	--	---	--

Nama pembimbing/promotor	Ketua : Ir. Tjitjah Aisyah, MS Anggota : Ir. Komot Heruwatno, MS	Ketua : Prof. Dr. Peni Suprapti Hardjosworo, M.Sc Anggota : 1. Dr. R. Muljono Judoamidjojo 2. Dr. Srihadi	Ketua : Prof. Dr. Wiranda Gentini Pilliang, M.Sc Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Iman Rahayu Hidayati Soesanto, MS
--------------------------	---	---	--

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2007	Penampilan Produksi dan Gambaran Histologis Organ Pencernaan Ayam Pedaging yang Diberi Ransum Bio MOS dari Bungkil Inti Sawit Hasil Pra	Ditlitabmas Dosen Muda	10
2	2008	Potensi dan Permasalahan Sapi Potong di Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Melalui Pendekatan	Bank Indonesia banjarmasin	22.5
3.	2009	Biokonversi Sampah Organik oleh Maggot, Pemanfaatannya untuk Pakan Ternak dan Produksi Minyak serta	Strategis Nasional Ditlitabmas	100
4	2009	Optimalisasi Potensi Keong Rawa "Kalambuai" Dengan Metode Pengolahan Silase Termodifikasi Untuk Meningkatkan Efisiensi	KKP3T. DEPTAN LITBANG	126
5.	2010	Komposisi Asam Lemak Larva Lalat Black Soldier Fly yang Dibiakkan dalam Campuran Kotoran Ayam dengan Minyak Ikan Lemuru dan Pemanfaatannya untuk Pakan Itik Alabio	Hibah Strategis Nasional Ditlitabmas	94

6	2011	Peningkatan Kualitas Bahan Pakan Lokal melalui Suplementasi Sulfur, dan Zn Organik terhadap kualitas Susu dan Daging Kambing Etawah	Hibah Bersaing Ditlitabmas	49.730
7	2014-2015	Optimasi Pemanfaatan Duckweed (Lemnaceae) sebagai sumber protein Melalui teknik preservasi Pakan	Hibah Bersaing	143.845
8	2016-2017	Peningkatan Produktivitas ternak kambing melalui pengembangan Wafer hijauan komplit berbasis Limbah Kelapa sawit	Hibah MP3Ei	197.625
dst				

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Peningkatan Kualitas dan daya Simpan Kepala udang Sebagai sediaan "Single cell Protein bagi Pakan itik di Kelompok Ternak sinar Jaya Pelaihari Kabupaten tanah Laut	DP2M Dikti.	7,43
2	2013	Penyuluhan Penggunaan Bahan Pakan Ternak Unggas pada Kelompok Ternak Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar	LPM Uniska	2
3	2013	IbM Peternak sapi Potong Di Kecamatan Pleihari Kabupaten Tanah Laut	DRPM Ditlitabmas	47
4	2014	Penyuluhan pemanfaatan Hijauan rawa sebagai pakan ternak di Sungai Buluh kabupaten hulu sungai Selatan	LP2M Uniska	3
5	2015	IbM Kelompok Pembibitan Ternak Itik di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar	DRPM	47,5
dst				

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Judul	Nama jurnal	Volume/nomor/tahun
2013	Comparison of estrus synchronization with application of prostaglandin F2 $\alpha$ intrauterine and intramuscular in bali and crossbred-	Pakistan Veterinary Journal	33 (4) ,pp.446 Terindex Scopus
2014	Characteristics and Nutrition Silage Duckweed (Family <i>Lemnaceae</i> ) Addition with Different Additives	International Journal of Biosciences	Volume 7 No. 5 2014 Hal 144-150
2014	Produktivitas Gulma Air (Lemnaceae) Sebagai Pakan	Prosiding Seminar Nasional "Bioresource Untuk Pembangunan Ekonomi Hijau"	ISBN 978-602-98275-7-6
2015	Utilization of Duckweed in Feed Goats on Availability of Protein and Energy Balance	International Journal of Agriculture Innovations and Research	Volume 4, Issue 4, ISSN (Online) 2319-1473
2015	Patogenicity of <i>Bacillus thuringiensis</i> which Isolated from Tidal Ecosystem against Diamond Backmoth Larvae, <i>Plutella</i>	Asian Journal of Applied Sciences	(ISSN: 2321 – 0893) Volume 03 – Issue 03, June 2015
2016	Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Perkebunan Sawit Sebagai Pakan Ternak melalui Teknologi Wafer Hijauan Komplit	Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan	ISBN : 978-602-6954-14-5 Hal 1268-1273
2017	Effect of fish oil addition to the skim milk-egg yolk extender on the quality of frozen-thawed bali bull	Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi	Dergisi 23 (4) ,pp.651 Terindex Scopus
2017	Tingkat Penggunaan <i>Trichoderma</i> sp dalam Fermentasi Pelepah sawit terhadap nilai pH, kandungan Protein kasar dan serat kasar	Prosiding Seminar nasional Berkelanjutan ke-8 Fakultas peternakan Universitas Padiadaran	ISBN 978-602-74116-3-0 Hal 844-852
2017	Agroecosystem Stability and Breakdown Leaves on Mustard Cropping after Application by the <i>Bacillus thuringiensis</i>	International Journal of Science and Research (IJSR)	DOI: 10.21275/ART20172344 ISSN online : 2319-7064

**A. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian	Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Perkebunan Sawit Sebagai Pakan Ternak melalui Teknologi Wafer Hijauan Komplit	20 Juli 2016, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalsel Banjarbaru
2	Berkelanjutan ke-8 Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Jatinangor Sumedang	Tingkat Penggunaan <i>Trichoderma</i> sp dalam Fermentasi Pelepah Sawit terhadap nilai pH, kandungan Protein kasar dan serat kasar	16 November 2016, Fakultas peternakan Universitas Padjadjaran Jatinangor Sumedang
3	The First International Conference on Food and Agriculture,	The Physical Quality Of Complete Feed Of Modified Granules Made From Legumes And Swamp Forage For Goat Feed	Politeknik Negeri Jember, Bali Nusa Dua, 20-21 Oct 2018
4	Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tanaman pakan Indonesia	Evaluasi Komposisi Botanis Dan Kandungan Nutrisi Pada Rumpun Rawa Kalakai ( <i>Stenochlaena Palustris</i> ) Dan Purun Tikus ( <i>Heleocharis Dulcis Burm</i> )  Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala	Kerjasama HITPI dengan Faperta Universitas Islam Kalimantan, Hotel Tree Park Banjarmasin 5-6 November 2018

**F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	BACILLUS THURINGIENSIS, Biologi, Isolasi, Perbanyakan, dan Aplikasinya	2017	66	Pustaka Banua
2		2019	65	Universitas Islam Kalimantan Press

3		2021	116	Zukses Express
---	--	------	-----	----------------

**G. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kualitas Organoleptik Telur Itik Asap Dengan Lama Pengasapan Yang Berbeda	2019	Hak Cipta	No. Pendaftaran: EC00201973438
2	Degradasi Polisakarida Mannan Pada Bungkil Inti Sawit Oleh Kapang <i>Trichoderma Reesei</i> Terhadap Total Gula, Energi Metabolisme Sejati Dan Retensi Nitrogen	2019	Hak Cipta	No. Pendaftaran: EC00201976222
3	Effect of Fish Oil Addition to the Skim Milk-egg Yolk Extender on the Quality of Frozen-Thawed Bali Bull Spermatozoa	2019	Hak cipta	Status: Granted   No. HKI:000137098
4	Produk Pakan Komplit Granule Berbahan dasar Hijauan Rawa Purun Tikus ( <i>Heleocharis dulcis</i> Burm)	2019	Paten	No. Pendaftaran: S00201910378
5	Kualitas Organoleptik Telur Itik Asap Dengan lama Pengasapan yang Berbeda	2019	Hak Cipta	No. HKI:000156328
6	Mesin Tetas Tenaga Surya Pada Peternakan Itik Alabio di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar	2018	Hak Cipta	No. HKI:000156851
7	Degradasi Polisakarida Mannan Pada Bungkil Inti Sawit Oleh Kapang <i>Trichoderma reesei</i> Terhadap Total	2019	Hak Cipta	No. HKI:000158883
8	Pemeliharaan Ayam Buras di Kelompok Tani Kindai Limpar Desa Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	2018	Hak Cipta	No. HKI:000210494

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Banjarmasin, 14 Januari 2022

TTD

Dr. Achmad aelani, S.Pt, M.Si



## Biodata Anggota 2

### A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Dr. Didi Susanto, M.I.Kom.M.Pd
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kotabesi, 01 Mei 1984
4.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
5.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
6.	NIK	069 710 547
7.	NIDN	1101058401
8.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kotabesi, 01 Mei 1984
9.	E-mail	<a href="mailto:didisusanto@fkip.uniska-bjm.ac.id">didisusanto@fkip.uniska-bjm.ac.id</a>
10.	No. Telp/HP	081349424199
11.	Alamat Rumah	Komplek Persada Permai Baru RT 31 Nomor 283 Semangat Dalam
12.	Alamat Kantor	Jl. Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123

### B. Riwayat Pendidikan

Program	S-1	S-2	S-3
Perguruan Tinggi	UNISKA	UNISKA/ULM	UNNES
Bidang Ilmu	Adm Negara	1. Ilmu Komunikasi 2. Pendidikan IPS	Pendidikan IPS
Tahun Masuk-Lulus	2005-2009	1. 2009-2011 2. 2011-2013	2014-2019

### C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1	2018	Pendidikan IPS dengan Aneka Keterpaduan	APBU UNISKA

2	2018	Konflik dan Gerakan Sosial di Rembang Pertarungan Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, dan Lingkungan	APBU UNISKA
3	2019	Interaksi dan Perubahan Sosial Pasca Konflik Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah	Hibah DIKTI
4	2019	Konsep Dasar IPS ke SD an	APBU UNISKA
5	2020	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	APBU UNISKA

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian Masyarakat	Sumber Dana
1	2018	Pembiasaan Budipekerti Anak Usia Dini Dengan Kosakata (Maaf,Tolong,Permisi, Dan Terima Kasih) Melalui kalimat sederhana terhadap orang tua di TKR.A. Al Mursalun	APBU UNISKA
2.	2019	Penguatan Peran Komunikasi Kader Dalam Pembangunan Kampung Kb Di Kelurahan Sungai Jingah Kota Banjarmasin	APBU UNISKA
3.	2021	Sosialisasi Penggunaan Tanaman Herbal untuk Diabetes Mellitus dan Pemeriksaan Kadar Gula Darah Di Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Tanah Laut	APBU UNISKA
4	2021	Sosialisasi Pemanfaatan Herbal Bumbu Dapur sebagai Antihipertensi dan Pemeriksaan Tekanan Darah di Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Tanah Laut  Karina	APBU UNISKA
5	2022	Pelatihan Online Pembuatan Makanan	Hibah Unpad

		Fermentasi Wadi	
--	--	-----------------	--

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan usulan penelitian.

Banjarmasin, Maret 2022

Anggota,

**TTD**

**Dr. Didi Susanto, M.I.Kom. M.Pd**

### Biodata Anggota 3

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Rizka Zulfikar, STp, MM
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor-300
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	061605931
5	NIDN	1106127301
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Banjarmasin, 6 Desember 1973
7	E-mail	<a href="mailto:rizkazulfikar@gmail.com">rizkazulfikar@gmail.com</a>
9	Nomor Telepon/HP	08125100306
10	Alamat Kantor	Jalan Adyaksa No. 2 Banjarmasin
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
13.	Mata Kuliah yang diampu	1. Ekonometrika
		2. Matematika Ekonomi dan Bisnis
		1. Teknik Proyeksi Bisnis
		2 Pengantar Ilmu Ekonomi

#### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Institut Pertanian Bogor	Universitas Lambung Mangkurat	
Bidang Ilmu	Teknologi Pangan	Magister Manajemen	
Tahun Masuk-Lulus	1991 – 1995	2001 - 2003	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Daya Hambat Ekstrak Tiga Tanaman Rempah-rempah (Kunyit, Temulawak dan Brotowali) Terhadap Perkembangan <i>Sitophilus zeamais</i> Pada Beras Selama Penyimpanan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan Modal Ventura Daerah	

Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Ir. Yadi Haryadi, MSc	Dr. H. M. Riza Firdaus, SE, Msc	
--------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

## B. Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2017	<i>The Effects Of Political Events Against Abnormal Return And Total Volume Sharia Shares Activity That Listed In Jakarta Islamic Index (JII)</i>	Mandiri	-
2	2017	Pengujian Metode Fuzzy Time Series Chen Dan Hsu Untuk Meramalkan Nilai Indeks Bursa Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (JII)	Mandiri	-
3	2017	Reaksi Signal Faktor Makroekonomi, Fundamental, dan Resiko Sistemis (Beta Saham) Terhadap Return Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)	Mandiri	-
4	2017	Strategi Meningkatkan Minat Beli Produk Hijau Sektor Fast Moving Consumer Goods Berdasarkan Persepsi Nilai, Risiko dan Kepercayaan Masyarakat	APBU	Rp 6.000.000
5	2017	Analisis Positioning Rumah Makan Khas Banjar Berdasarkan Persepsi Konsumen (studi pada RM Haji Fauzan, RM Mona dan RM Idah Jaya Banjarmasin)	APBU	Rp 6.000.000
6	2017	Sinyal Kinerja Profitabilitas, Solvabilitas dan Rasio Pasar yang Mempengaruhi Harga Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)	Mandiri	-
7	2018	Efektivitas Penggunaan Video Content Marketing Dalam Membentuk Persepsi dan Perilaku UMKM Untuk mengimplementasikan <i>Green Economy</i>	PDP – DIKTI	Rp 17.000.000
8	2018	Tingkat Kognitif, Afektif dan Konatif Masyarakat Banjarmasin Secara Demografis dan Psikografis Dalam Menyikapi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Tas Belanja	Mandiri	
9	2018	<i>The Structural Equation Model Of Perceived Value, Risk and Trust Toward Green Product (Empirical Research On Community Of South Kalimantan- Indonesia)</i>	Mandiri	-
10	2018	<i>Econometrics : Modification On Fuzzy Time Series First Order Time Invariant Method To Increase The Forecasting Accuracy Of Stock Index In Indonesia.</i>	Mandiri	-
11	2018	Tingkat Preferensi, Kepuasan dan Persepsi Risiko Masyarakat Kota Banjarmasin Terhadap Produk	APBU	Rp 6,000,000

		Hijau di Sektor Obat Tradisional Secara Demografis		
12	2018	Pengaruh Aktifitas Galeri Investasi, Modal Minimal Investasi Persepsi Resiko dan Persepsi Return Terhadap Minat Investasi Saham Syariah (Studi Pada Mahasiswa UNISKA)	APBU	Rp 6,000,000
13	2019	<i>Identification Of The Potential Market Segment Of Traditional Medicine Products Based On The Level Of Preference, Satisfaction And Risk Perception</i>	Mandiri	-
14	2019	Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan PDAM Bandarmasih	PDAM Bandarmasih	Rp 25,000,000
15	2020	Efektifitas Kontribusi Faktor Kebijakan Pemerintah, Insentif Keuangan dan Kondisi Lingkungan yang mempengaruhi Perilaku Sustainable Entrepreneurship UKM Kuliner Jalanan	Mandiri	-
16	2020	<i>Analysis Covariance Of Structure Untuk Identifikasi Faktor Eksternal Yang Berkontribusi Terhadap Perilaku Sustainable Entrepreneurship UKM</i>	APBU	Rp 7,000,000
17	2020	Identifikasi Faktor Internal Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku UKM Yang Berwawasan Lingkungan	APBU	Rp 4,000,000
18	2020	Economic Literacy Levels: A Case Study in Indonesian and Turkey University	Kastamanou University-Turkey	-
19	2020	Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat dan UMKM di Kabupaten Banjar	Bapeda – Litbang Kab. Banjar	Rp 93.000.000
20	2020	Penerapan Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Batubara Berbasis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PTUPT-Dikti	Rp 290.503.000
21	2021	Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Dengan Pendekatan Hipotesis Kuznet's Curve Dan Structural Equation Model	APBU Uniska	Rp 7.000.000
22	2021	Kelayakan Tunjangan Besaran Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan/Bangunan Fasilitas Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	DPRD Tk. II Tanah Bumbu	Rp 50.000.000
22	2021	Survey Kepuasan Karyawan PDAM 2021	PDAM Bandarmasih	Rp 27.500.000

### C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2017	Green Economy Workshop : Mempersiapkan Wirausaha Muda Yang Berwawasan Lingkungan di SMKN 3 Banjarmasin	APBU	Rp 3.000.000
2	2017	Penyuluhan Inovasi Produk dan Kemasan bagi Kelompok Usaha di Jalan Pulau Laut RT. 3 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Barat	APBU	Rp 3.000.000
3	2018	PKM Panti Asuhan Al Amin dan Panti Asuhan Sultan Suriansyah di Kecamatan Banjarmasin Utara	PKM-DIKTI	Rp 40.000.000
4	2018	Penyuluhan Manajemen Waktu dan Dampak Gadget pada Anak-Anak Di TPA Al Qur'an Darul Fathi Banjarmasin	Mandiri	
5	2019	Pelatihan Pembuatan Business Plan Model Canvas Untuk Perencanaan Bisnis UMKM Kuliner Jalanan di Kawasan Gatot Subroto Banjarmasin	APBU	Rp 3.000.000
6	2019	Workshop Saham Syariah Bagi Mahasiswa dan UMKM di Banjarmasin Untuk Meningkatkan Minat Berinvestasi Saham Syariah	APBU	Rp 3.000.000
7	2019	Sosialisasi Konsep Green Economy di Café Garden Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin	Mandiri	
8	2020	Penerapan Konsep 3 R - Green Economy di Usaha UKM Tapai Gambut Kec. Pematang Panjang, Kab. Banjar	Mandiri	
9	2020	Penerapan Produksi Yang Berwawasan Lingkungan di UMKM Dodol Kandangan – Hj. Noor Hikmah, Kab. Hulu Sungai Selatan.	Mandiri	
10	2021	Sosialisasi Konsep Implementasi Green Economy Sederhana Di Industri Cor Logam-UD. Sinar Daha Di Desa Nagara Kec. Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	APBU	Rp 2.000.000

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal / Prosiding	Volume/ Nomor/Tahun
1	2017	<i>The Effects Of Political Events Against Abnormal Return And Total Volume Sharia Shares Activity That Listed In Jakarta Islamic Index (JII)</i>	Jurnal JEMA : Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen - Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang , p-ISSN 1693-7864, e-ISSN 2597-4017, Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 3)	Vol 14, No 02 (2017) : 64 - 74., <a href="http://dx.doi.org/10.31106/jema.v14i02.511">http://dx.doi.org/10.31106/jema.v14i02.511</a>

2	2017	Pengujian Metode Fuzzy Time Series Chen Dan Hsu Untuk Meramalkan Nilai Indeks Bursa Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (JII)	Jurnal WIGA : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi - Stie Widyagama Lumajang, p-ISSN 2088-0944, e-ISSN 2549-5992, DOAJ, Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 4)	Vol 7, No 2 (2017) : 108 - 124, <a href="https://doi.org/10.30741/wiga.v7i2.157">https://doi.org/10.30741/wiga.v7i2.157</a>
3	2018	Reaksi Signal Faktor Makroekonomi, Fundamental, dan Resiko Sistemis (Beta Saham) Terhadap Return Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)	Jurnal At Tadbir : Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Uniska MAB Banjarmasin, p-ISSN 1979-1127, e-ISSN 2502-7433, Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 4)	Vol .1, No 2 (Juni 2017) : <a href="https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/attadbir/article/view/912">https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/attadbir/article/view/912</a>
4	2017	Tingkat Kepercayaan dan Minat Beli Masyarakat Banjarmasin Terhadap Produk Hijau Berdasarkan Segmentasi Demografis	Prosiding Seminar Nasioinal ASBIS 2017, p-ISSN 2541-6014, e-ISSN 2541-6022	Prosiding Asbis Vol. 2 No. 1 (2017) : 410-426, <a href="http://e-prosiding.poliban.ac.id/index.php/asbis/article/view/201">http://e-prosiding.poliban.ac.id/index.php/asbis/article/view/201</a>
5	2017	Sinyal Kinerja Profitabilitas, Solvabilitas dan Rasio Pasar yang Mempengaruhi Harga Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)	Jurnal OWNER , p-ISSN 2548-7507, e-ISSN 2548-9224, Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 4)	Vol. 1 No. 2 (2017) : 48 -62, <a href="http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/40">http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/40</a>
6	2018	Analisis Positioning Rumah Makan Khas Banjar Berdasarkan Persepsi Konsumen (studi pada RM Haji Fauzan, RM Mona dan RM Idah Jaya Banjarmasin)	JURNAL JEM, ISSN : 2614-4212 , Universitas Gajayana Malang, Jurnal Nasional	Vol. 19 No. 1 (2018) : 48 - 62, <a href="http://ejournal.uniga.malang.ac.id/index.php/JEM/article/viewFile/259/126">http://ejournal.uniga.malang.ac.id/index.php/JEM/article/viewFile/259/126</a>
7	2018	<i>The Relationship of Perceived Value, Perceived Risk, and Level of Trust Towards Green Products of Fast Moving Consumer Goods Purchase Intention</i>	Jurnal JEMA : Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen - Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang , p-ISSN 1693-7864, e-ISSN 2597-4017, Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 3)	Vol. 15, No. 2 (2018) : 85 -97, <a href="http://dx.doi.org/10.31106/jema.v15i2.838">http://dx.doi.org/10.31106/jema.v15i2.838</a>
8	2018	<i>Estimation Model And Selection Method Of Panel Data Regression: An Overview Of Common Effect, Fixed Effect, And Random Effect Model</i>	Center for Open Science : open exchange - scientific progress	No. 9qe2b (2018) : <a href="https://econpapers.repec.org/paper/osfinarxi/9qe2b.htm">https://econpapers.repec.org/paper/osfinarxi/9qe2b.htm</a>
9	2018	Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Ikan Patin Sebagai Potensi Usaha Bagi Pantii Asuhan Al Amin Dan Sultan Suriansyah Banjarmasin	Jurnal Pengabdian Al Ikhlas –Uniska MAB Banjarmasin, ISSN : 2461-0992, Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 5)	Vol. 4 No. 1 (2018) : <a href="https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/1632">https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/1632</a>



10	2019	Tingkat Pengetahuan Lingkungan, Persepsi dan Perilaku UMKM di Propinsi Kalimantan Selatan Dalam Mengimplementasikan Green Economy	Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Basah 2018- Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Vol. 4 No. 3 (2019) : 458-465, <a href="http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/230">http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/230</a>
11	2019	<i>The Level Of Cognitive, Affective And Konative Banjarmasin's Public Based On Demographic And Psychografic In Responding To Prohibition Policy The Use Of Plastic As Shooping Bags</i>	JURNAL JEM, ISSN : 2614-4212, Universitas Gajayana Malang, Jurnal Nasional	Vol. 19 No. 2 (2019) : 637 – 649, <a href="http://ejournal.unigamalang.ac.id/index.php/JEM/article/view/339">http://ejournal.unigamalang.ac.id/index.php/JEM/article/view/339</a>
12	2019	<i>Does Green Economy Video Really Work? The Effectiveness of Using Video Content Marketing in Forming MSMEs Perception and Behavior to Implement Green Economy</i>	Jurnal JEMA : Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen - Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang , p-ISSN 1693-7864, e-ISSN 2597-4017, DOAJ, Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 3)	Vol. 16, No.1 (2019) : 34-45, <a href="http://dx.doi.org/10.31106/jema.v16i1.1796">http://dx.doi.org/10.31106/jema.v16i1.1796</a>
13	2019	Workshop Saham Syariah Bagi Mahasiswa dan UMKM di Banjarmasin Untuk Meningkatkan Minat Berinvestasi Saham Syariah	Jurnal CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat-Ilin Institute, Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 4)	Vol. 2 No. 1 (2019) : <a href="https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.110">https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.110</a>
14	2019	<i>The Green Attitude, Intention Dan Behavior Comparison Between Government And Private Employee (The Guideliness)</i>	Center for Open Science : open exchange - scientific progress	No. h8ts6 (2019) : <a href="https://econpapers.repec.org/paper/osfosfxx/h8ts6.htm">https://econpapers.repec.org/paper/osfosfxx/h8ts6.htm</a>
15	2019	Adopsi Teknik Penyusunan Business Plan Model Canvas Untuk Perencanaan Bisnis UMKM Kuliner Jalanan Di Kawasan Gatot Subroto Banjarmasin	Jurnal Pengabdian Al Ikhlas –Uniska MAB Banjarmasin, ISSN : 2461-0992, Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 5)	Vol. 4 No. 2 (2019) : 174-185 <a href="https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/1955">https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AIJP/article/view/1955</a>
16	2019	Pengaruh Demografis Terhadap Tingkat Preferensi, Kepuasan Dan Persepsi Risiko Masyarakat Pada Produk Hijau Di Sektor Obat Tradisional	Jurnal EKUITAS – STIESIA Surabaya, e-ISSN 2548 – 5024, p-ISSN 2548 – 298X, Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 2)	Vol. 3 No. 4 (2019) : 168-187, <a href="https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/4049/456">https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/4049/456</a>
17	2019	<i>Enhancing Sustainable Entrepreneurship Behavior In Indonesian SMEs: External Drivers Role</i>	The 2 <sup>nd</sup> Mulawarman International Conference On Economics and Business-2019	Vol. 2 (2019) : 63-72 <a href="http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/MI/CEBProceeding/article/view/7068">http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/MI/CEBProceeding/article/view/7068</a>
18	2019	<i>Achieving Green Trust In Low Price Product Through Perceived</i>	The 2 <sup>nd</sup> Mulawarman International Conference On Economics and Business-2019	Vol. 2 (2019) : 143-148 <a href="http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/MI">http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/MI</a>

				<a href="http://CEBProceeding/article/view/7264">CEBProceeding/article/view/7264</a>
19	2020	<i>Warranting Increased Operational Performance of Pharmaceutical Firms of Indonesia through Collaborative and Calculative HRM Practices: Mediating Role of Employee Engagement</i>	Journal Of Systematic Reviews in Pharmacy, Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus-Q2)	Vol. 11 (2), 2020 : 516-524, <a href="https://www.sysrevpharm.org/fulltext/196-1583763908.pdf">https://www.sysrevpharm.org/fulltext/196-1583763908.pdf</a>
20	2020	Economic Literacy Levels: A Case Study in Indonesian University	Econder International Jurnal Of Academic	Volume 4, Issue 1, PP. 190-202, <a href="https://dergipark.org.tr/en/pub/econder/issue/54189/750474">https://dergipark.org.tr/en/pub/econder/issue/54189/750474</a>
21	2020	Productivity & Loyalty Development Modelsasean Free Market Era by Managing a Quality System of Work, Work Development, Prizes and Education Innovations	International Journal of Latest Research in Engineering and Technology (IJLRET) ISSN: 2454-5031	Volume 06, Issue 07, July 2020, PP. 01-10, <a href="http://www.ijlret.com/Papers/Vol-06-issue-07/1.B2020107.pdf">http://www.ijlret.com/Papers/Vol-06-issue-07/1.B2020107.pdf</a>
22	2021	How the Creativity Behavior of Medium Small Industry Impact the Culinary Tourism and Visit of Tourists During Pandemic Covid-19 ?	Psychology and Education Journal, ISSN : 1553-6939	Vol. 58 (5) PP: 2066-2075, <a href="http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/5715">http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/5715</a>
23	2021	Sustainable Entrepreneurship in Street Food Business: Government, Incentives and Community Role During Covid-19 Pandemic	Psychology and Education Journal, ISSN : 1553-6939	Vol. 58 (5) PP: 2833-2841, <a href="http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/5859">http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/5859</a>
24	2021	Managerial Ownership, Financial Performance and Firm Value: Evidence from Consumers Goods Company Listed in Indonesia Stock Exchange	International Journal of Science, Technology & Management ISSN : 2722-4015	Vol. 2 (3) PP : 791-801, <a href="https://ijstm.inarah.co.id/index.php/ijstm/article/view/206">https://ijstm.inarah.co.id/index.php/ijstm/article/view/206</a>
25	2021	How to Managing Emotion and Mood of Work Patterns From Home On The Performance Of Employees of Private Universities In South Kalimantan?	International Journal of Science, Technology & Management ISSN : 2722-4015	Vol. 2 (4) PP : 791-801, PP : 1184-1188 <a href="https://ijstm.inarah.co.id/index.php/ijstm/article/view/258">https://ijstm.inarah.co.id/index.php/ijstm/article/view/258</a>
26	2021	Examine The Behavior Of Private Universities Lecturer In Respecting Kampus Merdeka Policies Using Theory Of Planned Behavioral Approach	International Journal Of Economics, Management, Business, And Social Science (Ijembis)	Vol.1 (3) PP :255-266 <a href="https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis/article/view/17">https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis/article/view/17</a>
27	2021	The SME Condition During	International Journal of	Vol. 2 (3) PP : 718-

		Covid 19 Pandemic: Financial And Business Overview	Science, Technology & Management ISSN : 2722-4015	727, <a href="https://ijstm.inarah.co.id/index.php/ijstm/article/download/211/179">https://ijstm.inarah.co.id/index.php/ijstm/article/download/211/179</a>
28	2021	The Effect Of Economic Development On The Fulfillment Of The Right To A Good And Healthy Environment In South Kalimantan Province	International Journal Of Educational Research And Social Science, ISSN :	Vol. 2 (6) PP : 1585-1595, <a href="https://www.ijersc.org/index.php/go/article/view/147">https://www.ijersc.org/index.php/go/article/view/147</a>
29	2021	Encourage SMEs Sustainable Behavior During Covid-19 Pandemic Through Competitive Advantages And Corporate Culture	Serbian Journal Of Management, ISSN : 14524864, 22177159	Vol 16 (2), PP : 405-417, <a href="https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1452-48642102405Z">https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1452-48642102405Z</a>
30	2021	Examine The Behavior Of Private Universities Lecturer In Respecting Kampus Merdeka Policies Using Theory Of Planned Behavioral Approach	International Journal Of Economics, Management, Business, And Social Science (Ijembis)	Vol. 1 (3) : 255-266
31	2022	How Capital Structure And Financial Performance Impact On Food And Beverage Company Value?	International Journal of Science, Technology & Management	Vol. 3 (1) : 104-112
32	2022	Factors That Most Considered In Determining The Green Trust And Green Buying Interest	International Journal of Educational Research & Social Sciences	Vol. 3 (2) : 714-721
33	2022	Does the losses due to disaster have any contribution on economic growth ?	International Journal Of Economics, Management, Business, And Social Science (Ijembis)	Vol. 2 (1) : 255-266

#### F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 10 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional - <i>Applied Science, Business and Information System</i> - 2017	Tingkat Kepercayaan dan Minat Beli Masyarakat Banjarmasin Terhadap Produk Hijau Berdasarkan Segmentasi Demografis.	Tanggal 8 Nopember 2017, Hotel Rattan In Banjarmasin
2	<i>The 1st Borneo International Conference On Education and Social Sciences</i> - 2018.	<i>Econometrics : Modification On Fuzzy Time Series First Order Time Invariant Method To Increase The Forecasting Accuracy Of Stock Index In Indonesia.</i>	Tanggal 10 September 2018, Hotel Tree Park Banjarmasin

3	Seminar Hasil Penelitian Hibah DRPM Dikti Untuk Skim Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2018/2019	Efektivitas Penggunaan Video Content Marketing Dalam Membentuk Persepsi dan Perilaku UMKM Untuk mengimplementasikan <i>Green Economy</i>	Tanggal 13 Desember 2018, Uniska MAB Banjarmasin
4	Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat Hibah DRM Dikti untuk Skim Program Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2018/2019	PKM Panti Asuhan Al Amin dan Panti Asuhan Sultan Suriansyah di Kecamatan Banjarmasin Utara	Tanggal 18-19 Pebruari 2019, Garden Palace Hotel Surabaya
5	Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Basah, ULM - 2019	Tingkat Pengetahuan Lingkungan, Persepsi dan Perilaku UMKM di Propinsi Kalimantan Selatan Dalam Mengimplementasikan Green Economy	Tanggal 17 Nopember 2019, Hotel Arya Barito Banjarmasin
6	<i>The 1<sup>st</sup> Semarang International Conference Series On Business and Economics - 2019</i>	<i>Identification Of The Potential Market Segment Of Traditional Medicine Products Based On The Level Of Preference, Satisfaction And Risk Perception</i>	Tanggal 10 Juli 2019, Hotel Gumaya Tower Semarang
7	<i>The 2<sup>nd</sup> Mulawarman International Conference On Economics and Business - 2019</i>	<i>Enhancing Sustainable Entrepreneurship Behavior In Indonesian SMEs: External Drivers Role</i>	Tanggal 5 Nov 2019, Hotel Bumi Senyur Samarinda
8	<i>The 2<sup>nd</sup> Mulawarman International Conference On Economics and Business - 2019</i>	<i>Achieving Green Trust In Low Price Product Through Perceived</i>	Tanggal 5 Nov 2019, Hotel Bumi Senyur Samarinda
9	<i>Workshop Analisis Data Kuantitatif</i>	<i>Structural Equation Modeling dan Interpretasi Data Penelitian dengan AMOS 24</i>	Tanggal 8 Nov 2020, Universitas Bung Hatta Padang
10	<i>Focus Group Discussion Kemenristek Dikti 2021</i>	Kualitas Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Selatan	Tanggal 1 Oktober 2021 Universitas Bung Hatta Padang
11	<i>Focus Group Discussion Kemenristek Dikti 2022</i>	Dampak Kerusakan Lingkungan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Selatan	Tanggal 25 Nov 2022 Universitas Bung Hatta Padang

### G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	No ISBN	Penerbit
1	Pengantar Green Economy	2019	9786232098787	Deepublish – Yogyakarta
2	Peran Persepsi Nilai, Risiko dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Minat Beli Produk Hijau	2019	9786230204203	Deepublish – Yogyakarta
3	Manajemen Operasi (Teori dan Praktis)	2020	9786236608432	Widina Bhakti Persada – Bandung
4	Manajemen Sumber Daya Manusia (Sebuah strategi, Perencanaan dan	2020	9786236608425	Widina Bhakti Persada – Bandung

	Pengembangan)			
5	Regulasi kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya alam berbasis prinsip-prinsip dalam konstitusi	2020	9786237583592	UNISKA Press – Bnajarmasin
6	Kampus Merdeka Seri 5: Transformasi Media Pengajaran Kampus Merdeka di Era Kenormalan Baru	2021	9786232641709	Syiah Kuala University Press
7	Dasar Manajemen dan Kewirausahaan	2021	9786236457320	Widina Bhakti Persada – Bandung
8	Brand Marketing	2021	9786236457061	Widina Bhakti Persada – Bandung
9	Perencanaan Pemasaran	2022	9786236457452	Widina Bhakti Persada – Bandung
10	MSDM Dalam Organisasi	2022	9786236457701	Widina Bhakti Persada – Bandung

#### H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor P/ID
1	2019	Sinyal Kinerja Profitabilitas, Solvabilitas dan Rasio Pasar yang Mempengaruhi Harga Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)	Hak Cipta	EC00201977700
2	2019	The Effects Of Political Events Against Abnormal Return And Total Volume Sharia Shares Activity That Listed In Jakarta Islamic Index (JII)	Hak Cipta	EC00201974748
3	2019	Pengujian Metode Fuzzy Time Series Chen Dan Hsu Untuk Meramalkan Nilai Indeks Bursa Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (JII)	Hak Cipta	EC00201974725
4	2019	Pengantar Green Economy	Hak Cipta	EC00201977695
5	2019	Pengaruh Aktifitas Galeri Investasi, Modal Minimal Investasi, Persepsi Resiko Dan Persepsi Return Terhadap Minat Investasi Saham Syariah	Hak Cipta	EC00201977696
6	2020	Does Green Economy Video Really Work? The Effectiveness of Using Video Content Marketing in Forming MSMEs Perception and Behavior to Implement Green Economy	Hak Cipta	EC00202027183
7	2020	Pengaruh Demografis Terhadap Tingkat Preferensi, Kepuasan Dan Persepsi Risiko Masyarakat Pada Produk Hijau Di Sektor Obat Tradisional	Hak Cipta	EC00202027184
8	2021	Managerial Ownership, Financial Performance and Firm Value: Evidence from Consumers Goods Company Listed in	Hak Cipta	EC00202185904

		Indonesia Stock Exchange		
--	--	--------------------------	--	--

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-	-	-	-

**K. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi/institusi lainnya )**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	The Best Paper – Seminar Nasional <i>Applied Business and Information System</i>	Politeknik Negeri Banjarmasin	2017
2.	Pemakalah terbaik – Seminar Hasil Penelitian Dana APBU Uniska tahun anggaran 2017	LP2M Uniska	2018
3.	Juara I Lomba Artikel Ilmiah - Pekan Ilmiah Uniska 2018.	Uniska MAB Banjarmasin	2018
4.	Penerima Hibah Penelitian DRPM Dikti Skim PDP Tahun anggaran 2018	DRPM Dikti	2018
5.	Penerima Hibah Pengabdian Masyarakat DRPM Dikti Skim PKM Tahun anggaran 2018	DRPM Dikti	2018
6.	Juara I Lomba Poster Ilmiah - Pekan Ilmiah Uniska 2019.	Uniska MAB Banjarmasin	2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian dosen.

Banjarmasin, Juni 2022

Ketua,



**Rizka Zulfikar, STp, MM**

### LAMPIRAN 3. SURAT TUGAS PENELITIAN



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPI/PT/V/2020

KAMPUS : JL. ADHSAKSA NO. 2 KAYUTANGI BANJARMASIN-70123, TELP/FACS (0511) 3304352 www.uniska-bjm.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 25/UNISKA-LP2M1/2022

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Nural Listiyani, S.H., M.H.  
Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.  
Rizka Zulfikar, S.TP., M.M.  
Dr. Didi Susanto, S.Sos., M.I.Kom., M.Pd.

Keperluan : Melaksanakan Penelitian "Analisis Pengaruh Indikator Pendidikan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjar"

Waktu : 19 Januari – 19 Juni 2022

Tempat : Kabupaten Banjar

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan di: Banjarmasin  
Pada Tanggal : 19 Januari 2022

  
Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.  
NIP. 19670107 199403 1 002

## LAMPIRAN 4. MOU PELAKSANAAN KAJIAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN BANJAR**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**

NOMOR :     / PKS / PPI / BAPPEDA LITBANG/ 2022  
NOMOR : 23 / UNISKA-LP2M / I / 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Martapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. Mohammad Riza Dauliy, S.T., M.T. : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Martapura, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Dr. Achmad Jaclani, S.Pt., M.Si : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Nomor : 066/KEP/UNISKAP/4/VIU/2017 tanggal 6 Juli 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, berkedudukan di Jalan Adhyaksa Nomor 2 Kayubangi Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banjar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar yang bertanggung jawab kepada Bupati Banjar;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur lembaga pelaksana di bidang penelitian pada Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat;
- (3) Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan kesadaran masing-masing **PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi untuk kepentingan bersama dan saling membantu dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah untuk terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari tentang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Nomor : 06/NKB/BANJAR/TAHUN 2020 dan Nomor : 14/UNISKAMA.1D/2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan,

Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **PENGERTIAN**

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
2. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar;
3. Lembaga Penelitian adalah penyelenggara fungsi kealibangan yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan pengkajian serta pengabdian pada masyarakat yang dalam hal ini Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari;
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;
5. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

#### **Pasal 2**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama Penelitian dan Pengkajian serta Pengabdian Kepada Masyarakat.  
Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
  - a. meningkatkan dan memanfaatkan kemampuan teknis sumberdaya manusia;
  - b. menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengkajian diantara kedua belah pihak;  
dan
  - c. melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi & kewenangan masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Banjar dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjar.

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah mencakup kegiatan swkelola untuk peningkatan kemampuan teknis sumberdaya manusia melalui penelitian, pengembangan dan penerapan iptek dalam pemanfaatan potensi sumberdaya di Kabupaten Banjar.

**Pasal 4**

**OBJEK PERJANJIAN**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pendidikan dan Kebudayaan.

**Pasal 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. Menyusun program secara terpadu sebagai pedoman umum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
  - b. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan; dan
  - c. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akan menjadi dasar pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. Menyediakan anggaran/dana untuk keperluan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian serta Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
  - c. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administratif maupun keuangan sesuai progress pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 6**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Menerima dana sesuai anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pada Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - b. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan;
  - c. Membuat laporan hasil pekerjaan;
  - d. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
  - e. Menyerahkan hasil laporan pekerjaan baik berupa hard copy maupun soft copy; dan
  - f. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 7**

**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja pelaksana dengan sepengetahuan masing-masing pimpinan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU sesuai dengan anggaran yang tersedia.

**Pasal 9**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan 19 Januari 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini; dan
- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Perubahan (Addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 10**

**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima belas hari setelah terjadinya *force majeure*;

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
- peperangan;
  - kerusuhan/huru-hara;
  - revolusi;
  - bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
  - pemogokan umum;
  - sabotase; dan
  - kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

#### **Pasal 11**

##### **BATALNYA PERJANJIAN**

- Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (Sepuluh) hari kalender;
- Pembatalan Perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga; dan
- Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

#### **Pasal 12**

##### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir apabila :

- Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini;
- Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga terjadi Pembatalan Perjanjian ini;
- Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi; dan
- Berlakunya syarat batal perjanjian.

**Pasal 13**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Martapura.

**Pasal 14**

**KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama Perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 3 (tiga) rangkap sebagai lindungan.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**

**H. Mohammad Riza Dauly, S.T., M.T.**  
NIP. 19771018 200312 1 008

**Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si**  
NIP. 19670107 199403 1 002

## LAMPIRAN 5.

# SmartPLS Report

### Final Results

#### Path Coefficients

#### Mean, STDEV, T-Values, P-Values

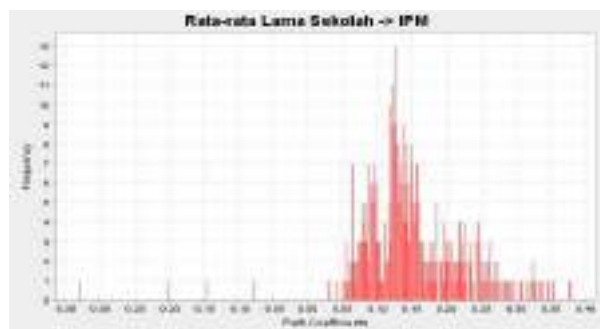
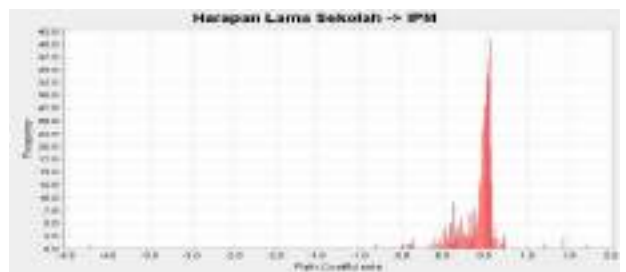
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV)	P Values
Harapan Hidup -> IPM	0,185	0,241	0,105	1,004	0,316
Rata-rata Lama Sekolah -> IPM	0,122	0,134	0,115	1,057	0,291
Harapan Lama Sekolah -> IPM	0,491	0,412	0,214	2,292	0,022
Pengeluaran Perkapita -> IPM	0,209	0,201	0,0076	2,759	0,006

#### Confidence Intervals

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	2.5%	97.5%
Harapan Hidup -> IPM	0,185	0,241	-0,049	0,609
Rata-rata Lama Sekolah -> IPM	0,122	0,134	0,057	0,322
Harapan Lama Sekolah -> IPM	0,491	0,412	-0,127	0,646
Pengeluaran Perkapita -> IPM	0,209	0,201	0,096	0,290

#### Confidence Intervals Bias Corrected

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Bias	2.5%	97.5%
Harapan Hidup -> IPM	0,185	0,241	0,058	-0,061	0,579
Harapan Lama Sekolah -> IPM	0,122	0,134	-0,080	-0,093	0,651
Pengeluaran Perkapita -> IPM	0,491	0,412	-0,006	0,127	0,303
Rata-rata Lama Sekolah -> IPM	0,209	0,201	0,028	-0,202	0,235



## **LAMPIRAN 6.**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **PENINGKATAN IPM KABUPATEN BANJAR MELALUI PENDIDIKAN**

- A. Pemerataan Pendidikan
  - 1. Pemerataan dan perluasan akses
  - 2. Pengadaan Ssarana Prasarana Pendidikan
  - 3. Pemerataan uantitas dan Kualitas tenaga pendidik
  - 4. Pengadaan Perpustakaan Sekolah
  - 5. Rehabilitas Ruang Kelas
  - 6. Bantuan Operasional Sekolah
  - 7. Penyelenggaraan Layanan Khusus Pendidikan
- B. Penigkatan Mutu dan Daya Saing
  - 1. Pengembangan model pendidikan
  - 2. Peningkatan kapasitas institusi dan SDM pendidikan
  - 3. Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
  - 4. Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian pendidikan
  - 5. Pengembangan profesi pendidikan
  - 6. Perbaikan sarana dan bahan ajar pendidikan
- C. Penguatan Tata Kelola
  - 1. Sosialisasi pendidikan
  - 2. Pengembangan kapasitas dewan pendidikan dan komite sekolah
  - 3. Pengembangan EMIS (Education Management Information System)
  - 4. Peningkatan partisipasi masyarakat
  - 5. Penataan pengembangan sistem informasi manajemen
  - 6. Pengembangan pendidikan kesetaraan



## MATRIX KUESIONER

No	Komponen yang ditanyakan	Responden				
		1	2	3	4	5
<b>A. Pemerataan Pendidikan</b>						
1	Pemerataan dan perluasan akses	X				
2	Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan	X				
3	Pemerataan kuantitas dan Kualitas tenaga pendidik	X				
4	Pengadaan Perpustakaan Sekolah	X				
5	Rehabilitas Ruang Kelas	X				
6	Bantuan Operasional Sekolah	X				
7	Penyelenggaraan Layanan Khusus Pendidikan	X				
<b>B. Peningkatan Mutu dan Daya Saing</b>						
1	Pengembangan model pendidikan	X				
2	Peningkatan kapasitas institusi dan SDM pendidikan	X				
3	Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	X				
4	Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian pendidikan	X				
5	Pengembangan profesi pendidikan	X				
6	Perbaikan sarana dan bahan	X				

	ajar pendidikan					
<b>C. Penguatan Tata Kelola</b>						
<b>1</b>	Sosialisasi pendidikan	<b>X</b>				
<b>2</b>	Pengembangan kapasitas dewan pendidikan dan komite sekolah	<b>X</b>				
<b>3</b>	Pengembangan EMIS (Education Management Information System)	<b>X</b>				
<b>4</b>	Peningkatan partisipasi masyarakat	<b>X</b>				
<b>5</b>	Penataan pengembangan sistem informasi manajemen	<b>X</b>				
<b>6</b>	Pengembangan pendidikan kesetaraan	<b>X</b>				
<b>B. Hambatan ?</b>						
<b>1</b>						<b>X</b>
<b>2</b>						<b>X</b>
<b>3</b>						<b>X</b>
<b>4</b>						<b>X</b>
<b>5</b>						<b>X</b>

Keterangan :

Responden 1 : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjar

Responden 2 : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar

Responden 3 : Pimpinan/Pengelola MI/SD dan SMP/MTS

Responden 4 : Pimpinan/pengelola Pesantren

Responden 5 : Masyarakat/orangtua yang meyekolahkan anaknya di SD/MI, SMP/MTS dan Pesantren

LAMPIRAN 7. DOKUMENTASI KEGIATAN



